



TB News

TRIBRATA

AKTUAL & FAKTUAL



MAY DAY,
MENGAWAL
HARAPAN BURUH



TRIBRATAnews • Edisi IV 2025

M E M B U K A R U A N G T R A N S P A R A N S I P U B L I K





EDITORIAL

Pelindung
KAPOLRI, WAKAPOLRI

Penasehat
KADIVHUMAS POLRI

Ketua Pengarah
**KARO PENMAS, KARO PID, KARO MULTIMEDIA,
PENATA KEHUMASAN POLRI UTAMA**

Staf Ahli
PARA KABAG DIVHUMAS POLRI

Pemimpin Redaksi
**KOMBES POL. BAMBANG TJAHO BAWONO, S.I.K.,
S.H., M.HUM., M.SI.**

Staf Redaksi
**AKBP Drs. SUWANDA, M.Si.
KOMPOL RUDI HARTONO, S.Kom., S.I.K.,
M.Kom., M.I.K.
PEMBINA AGUSTIN EKAWATI, S.E.
IPTU DITA PRIMA JUWITA, S.I.Kom.
IPDA NIFRINAS YULISTIN RIZKY, S.I.Kom.
PENDA I HARYATI, S.E.
IPDA I DEWA GEDE YUDHA PERWIRA ADHI
PRADNYANA, S.Kom.
BRIGADIR AMANDA SILFIA, S.H.
BRIPDA ALDI RASYID
BRIPDA IRSYAD KOVA ANUGRAH SIREGAR
BRIPDA CINTA AMELIA PUTRI AHMAD**

Art Director
AGUNG SUPRIYANTO WIDADI, S.Ds.

Fotografer
**BAG PRODDOK
DIVHUMAS POLRI**

Penerbit
**BAG PENSAT
DIVHUMAS POLRI**

Kontributor
SATKER MABES/SATWIL POLDA

Percetakan
PT Arfi Dua Satu

Alamat Redaksi
**Bag Pensat Biro Penmas Divisi Humas Polri
Jalan Trunojoyo No. 3
Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7218141, 7218770
Faks. (021) 7260208, 7218141**

Menjamin Kepastian Investasi

Memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day setiap tanggal 1 Mei tentu bukan sekadar seremoni tahunan. May Day menjadi pengingat perjuangan panjang pekerja merebut keadilan dan martabat di tempat kerja.

Sejarah mencatat, Hari Buruh yang lahir dari aksi unjuk rasa besar-besaran tahun 1886 di Haymarket, Chicago menuntut penerapan jam kerja adalah titik kebangkitan gerakan buruh global.

Di Tanah Air, selain bangkit untuk merebut hak-hak kerja lebih baik, gerakan buruh merajut sejarah bersama dengan perjuangan bangsa melawan kolonialisme. Gerakan buruh menjadi media sekaligus pupuk yang subur bagi tumbuhnya tunas-tunas kebangkitan kesadaran nasional.

Satu abad kemudian ketika buruh tak lagi menghadapi cambuk, pabrik penuh asap, dan jam kerja yang panjang, mereka justru dihadapkan pada ketidakpastian kerja, fleksibilitas semu, serta teknologi yang secara radikal merombak lanskap tenaga kerja.

Memperingati Hari Buruh bukan sekadar mengenang sejarah perlawanan atau sekadar simbol perayaan. May Day adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi kembali praktik ketenagakerjaan yang sedang kita hadapi. Peringatan Hari Buruh harus menjadi ajang meneguhkan komitmen untuk menciptakan ekosistem kerja yang produktif sekaligus manusiawi.

May Day harus dimaknai sebagai seruan kolektif untuk menemukan titik keseimbangan baru: membangun dunia usaha yang kompetitif sekaligus memuliakan buruh sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar alat produksi semata. Upah yang berkeadilan sosial harus menjadi fondasi bagi stabilitas ekonomi dan politik nasional.

Hubungan industrial modern mensyaratkan relasi buruh dan pengusaha dalam kerangka simbiosis mutualisme. Buruh membutuhkan upah adil untuk hidup layak sedangkan pengusaha membutuhkan kelenturan biaya tenaga kerja agar tetap bisa bersaing. Tanpa pengaturan yang cermat, problematika ini akan menyeret dunia usaha ke dalam ketidakpastian, sementara buruh terjerembab ke dalam jurang eksplorasi.

Tentu saja negara memiliki tanggung jawab besar. Selain wajib menciptakan iklim kerja yang adil, sehat, dan berkelanjutan, negara juga harus menjamin iklim investasi yang kondusif.

Sebagai penanggung jawab pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Korps Bhayangkara telah membuktikan kontribusinya melalui pencegahan tindak pidana, pendampingan mencegah tindak pidana dan penindakan sebagai ultimum remedium.

Semangat pendampingan dan pencegahan diharapkan memberikan pemahaman dan edukasi bagi para pelaku usaha terkait aturan serta perizinan di dunia usaha. Sementara di sisi lain, kepastian iklim investasi yang aman dan kondusif, pada gilirannya memberikan kepastian bagi investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Selamat Hari Buruh Internasional! [*]

Redaksi Majalah **Tribrata News**

menerima kiriman naskah atau tulisan tentang Kepolisian atau ilmu pengetahuan umum maupun artikel lainnya.
E-mail: pensat.divhumas@gmail.com



08 laporan UTAMA

Ketika Buruh Tak Lagi Sekadar Angka

Perayaan Hari Buruh Tahun 2025 seperti menjadi ajang pesta rakyat. Polri yang mengedepankan pendekatan humanis membangun ruang dialog yang konstruktif.

22 UNGKAP KASUS

- BARESKRIM SITA RP 530 MILIAR UANG JUDI ONLINE



Foto Cover
Kapolri bersama buruh dalam acara May Day 2025
Sumber: Div Humas Polri

30 KABAR JAJARAN

- OPLOSAN GAS SUBSIDI RUGIKAN NEGARA MILIARAN RUPIAH

42 INOVASI

- HOEGENG AWARDS 2025: MENJAGA INTEGRITAS PEMILIHAN POLISI TELADAN

50 BUNGA RAMPAI

- MEMBERANTAS PREMANISME UNTUK MENJAGA IKLIM INVESTASI

66 INSPIRATIF

- AIPTU JIMMI FARMA: MENEBAR PENDIDIKAN, DIGANJAR SEKOLAH PERWIRA

78 VIRAL

- SPONTAN LEPAS SERAGAM, AKSI KAPOLSEK INI TUAI PENGHARGAAN



KEPALA DIVISI HUMAS POLRI
BESERTA STAF DAN JAJARAN

Mengucapkan



Selamat **HARI BURUH**

INTERNASIONAL

1 MEI 2025

"Dengan semangat kerja keras dan dedikasi, buruh bersatu untuk menciptakan kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat menuju Indonesia Emas 2045"



Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
Kepala Divisi Humas Polri



Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) gabungan yang diikuti satuan Divisi Hukum; Divisi Humas; Divisi Teknologi, Informasi dan Komunikasi dan Divisi Hubungan Internasional Polri, di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 30 April 2025.

Dalam arahannya, Kapolri menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras seluruh personel di berbagai bidang tugas. Kapolri juga menekankan soal isu-isu yang tengah ramai di masyarakat untuk menjadi perhatian khusus.

"Terkait dinamika global seperti perang dagang, isu penurunan ekonomi, serta peluang strategis pertumbuhan ekonomi di daerah seperti Batam yang perlu didukung oleh peran aktif Polri," kata Kapolri dalam arahannya.

Dalam pembukaan rakernis gabungan tersebut Kapolri juga menandatangi dan meresmikan Renovasi dan Pembangunan Gedung Divhumas Polri Extension sekaligus



menerima *blueprint* Divisi Humas Polri yang berisi dokumen rancangan strategis yang disusun akademisi, praktisi, dan tenaga ahli dan founding father Humas Polri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan kegiatan Hari Buruh atau May Day Fiesta berjalan dengan aman dan nyaman sekaligus memastikan titik-titik pengamanan di kawasan Silang Monas, Kamis 1 Mei 2025.

Pada kesempatan tersebut Kapolri menginstruksikan seluruh jajaran Korps Bhayangkara untuk mengawal buruh mulai dari proses kedatangan hingga selesai kegiatan.

"Hari ini rekan-rekan buruh melaksanakan kegiatan perayaan May Day Fiesta di Monas. Kita lihat masih banyak yang berdatangan. Tentunya kita bersama seluruh rekan-rekan terkait lainnya yang terlibat dalam pengamanan akan mengawal mulai dari proses keberangkatan sampai dengan nanti kembali," kata Kapolri.

Kapolri juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menghadiri kegiatan May Day Fiesta yang tentunya akan menjadi hal yang baik untuk buruh.



Kapolri juga meminta agar seluruh petugas melakukan pengaturan arus lalu lintas dengan baik sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani. Baik itu kelompok buruh yang akan melakukan aksi ataupun masyarakat yang akan beraktivitas.



Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaksanakan kegiatan panen raya jagung di Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Jumat 16 Mei 2025.

Panen raya jagung tersebut merupakan bentuk kongkret dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah hari ini kami bersama-sama dengan Pak Mentan bisa melaksanakan kegiatan panen jagung. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mentan bahwa salah satu kekuatan dari negara salah satunya apabila kita memiliki ketahanan pangan, kemandirian pangan," kata Kapolri.

Hadir juga di lokasi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Rusdi Hartono hingga Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno.

Kapolri menerangkan panen raya jagung menjadi salah satu kekuatan negara dan merupakan bagian dari salah satu program Asta Cita Presiden Prabowo yang harus didukung dan dikawal.



Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung peletakan batu pertama pembangunan Asrama Polresta Samarinda di Jalan Gelatik, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu 17 Mei 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri mengungkapkan pembangunan asrama Polresta Samarinda ini merupakan komitmen dari Polri dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

"Tentunya ini merupakan bagian dari program peningkatan kesejahteraan terhadap prajurit Polri, dan harapan kita tentunya dengan pembangunan yang dilakukan ini bisa meningkatkan pelayanan kepolisian, pelayanan di dalam melaksanakan tugas kita melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat juga akan bisa lebih optimal," kata Kapolri.

Proyek tersebut berdiri di atas lahan seluas 1,46 hektare yang merupakan hibah dari Pemerintah Kota Samarinda. Dengan anggaran sebesar Rp65,57 miliar, pembangunan ditargetkan rampung dalam waktu 240 hari. [*]



■ Perayaan May Day Fiesta 2025



MAY DAY, MENGAWAL HARAPAN BURUH

Perayaan Hari Buruh atau May Day 2025 yang meriah menjadi catatan baru pengakuan peran dan sumbangsih kaum pekerja bagi iklim investasi dan dunia usaha. Pengamanan Polri yang mengedepankan pendekatan humanis juga menjadi salah satu keberhasilan pengamanan massa dalam jumlah besar.

Ketika Buruh **Tak Lagi Sekadar Angka**

Perayaan Hari Buruh Tahun 2025 seperti menjadi ajang pesta rakyat. Polri yang mengedepankan pendekatan humanis membangun ruang dialog yang konstruktif.



Pagi baru saja membuka tirai ketika ribuan kaki melangkah masuk ke kawasan Silang Monas. Cahaya matahari menari di wajah-wajah yang tak selalu punya waktu untuk bercermin. Datang dari berbagai kota, buruh bergelombang datang membawa kantong bekal, poster tuntutan, dan satu tujuan yang sama. Harapan.

Di antara lautan manusia itu, Hendi, 39 tahun, buruh pabrik sepatu dari Bekasi, berdiri kaku. Ia mengusap matanya pelan ketika dari kejauhan terlihat sosok berbaju safari melambaikan tangan. Itu Presiden Prabowo Subianto.

"Selama 15 tahun saya jadi buruh," katanya dengan suara yang serak oleh yel-yel sepanjang jalan, "baru kali ini Presiden datang ke kami."

Hari Buruh pada tanggal 1 Mei atau May Day 2025 menjadi peristiwa yang tak biasa bagi para pekerja. Bukan hanya karena jumlah massa yang menyentuh lebih dari 200.000 orang, tetapi karena hadirnya Presiden di tengah-tengah mereka.

Di atas panggung berlatar belakang Monumen Nasional, suara pidato bercampur sorak sorai, dan di bawahnya -di tanah yang mereka pijak dengan lelah dan bangga- hidup cerita-cerita kecil yang mungkin luput dari sorotan kamera.

Ria, 28 tahun, datang dari Garut. Bersama 1.400 rekan buruh garmen lainnya, ia memulai perjalanan sejak dini hari. Mereka menumpang truk hingga Cikampek, lalu melanjutkan dengan berjalan kaki. "Enggak papa kaki lecet, asal suara kami sampai," katanya sembari menunjukkan foto anak lelakinya yang terselip di balik kartu identitas. Foto itu nyaris kusam, tapi tatapannya tetap jernih.

Ria tertawa lepas ketika Presiden menyebut soal rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. "Bu Ria nanti bisa beli sepatu baru buat anak tanpa harus utang lagi, ya?" canda seorang temannya. Candaan yang sederhana, tapi menggantung seperti doa di udara siang.



Doa Tulus

Di sisi depan panggung, Muhammad Syaifudin, 35 tahun, tanpa rencana menjadi pusat perhatian. Ketika ia berteriak spontan, "Topi, Pak! Panas, Pak!" tak ada yang menyangka beberapa menit kemudian sebuah topi benar-benar datang-diserahkan oleh Sekretaris Kabinet, langsung dari Presiden.

"Ini bukan sekadar topi. Ini akan saya simpan sampai cucu saya besar nanti," kata Syaifudin. Matanya berkaca-kaca dan wajahnya menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar kebanggaan. Ia merasa dihargai.

Tidak semua datang dengan yel-yel. Di sebuah sudut, sekelompok buruh duduk melingkar. Mereka tak sedang berdiskusi atau menyusun strategi. Seorang lelaki paruh baya memimpin doa, suaranya pelan namun mantap. "Ya Allah, beri kekuatan pada pemimpin kami, agar benar-benar mendengar kami," ucapnya.



Hendi, yang sebelumnya menangis melihat Presiden, kini ikut menunduk. Bibirnya bergetar, mengamini doa itu dengan khusyuk. Di kerumunan yang hiruk-pikuk, ada sejenak hening yang sakral.

Namun, di balik suka cita dan simbol-simbol politik yang menghangatkan hati, ada kesadaran lain yang tak bisa ditepis. Samsul, 44 tahun, koordinator serikat buruh dari

Tangerang, mengeluarkan lembar tuntutan yang dilipat rapi di saku kemeja. "Kami senang Presiden datang. Tapi, kami tunggu yang lebih penting: tindak lanjut."

Ia menunjukkan daftar panjang revisi regulasi, jaminan kerja, dan perlindungan sosial yang menurutnya sudah terlalu lama menjadi janji kosong. "Hari ini kami merasa dilihat. Tapi esok, kami ingin didengar."

Detik yang Akan Diingat

Ada momen-momen yang mungkin tak masuk laporan media arus utama. Seorang nenek buruh kebersihan mencium tangan Presiden ketika ia turun dari panggung. Atau anak-anak buruh migran yang digendong ibunya mendapat permen dari pengawal istana. Juga cerita di tenda medis, seorang buruh 50 tahun pingsan karena kepanasan. Saat sadar,





ia bertanya, "Presiden masih di sana? Saya belum dengar pidatonya."

Hari itu, di tengah keramaian, para buruh Indonesia merasakan sesuatu yang telah lama hilang: kehadiran simbolik yang memberi ruang pada eksistensi mereka. Bukan sekadar angka statistik di laporan kementerian, atau barisan massa dalam siaran berita.

Menjelang senja, ketika langit Monas mulai berwarna tembaga, satu per satu peserta mulai pulang. Di antara mereka,

Ria masih berdiri di depan panggung yang kini kosong. Ia menatap ke arah tempat Presiden berdiri beberapa jam lalu. "Besok kami kembali ke pabrik," katanya pada temannya.

Tapi hari ini, ia tak pulang dengan tangan kosong. Di genggamannya, sebuah bendera kecil bertuliskan May Day 2025. Ia melipatnya perlahan, lalu menyimpannya di saku baju. Seperti menyimpan sebuah janji, yang belum tentu ditepati, tapi terlalu berharga untuk dibuang. [*]



Pendekatan Humanis Adalah Kunci

*Pendekatan humanis memastikan buruh
merayakan Hari Buruh Internasional dengan aman dan dilayani. –*



Di balik gegap gempita panggung orasi dan parade buruh, aparat keamanan berdiri tenang. Bukan dengan tameng, bukan pula dengan laras panjang. Sebanyak 13.701 personel dikerahkan oleh Polri untuk mengamankan peringatan May Day 2025 di Monas.

Namun, yang terlihat di lapangan bukanlah barisan polisi yang membuat gentar, melainkan wajah-wajah berseragam yang justru memberi botol air mineral, mengangkat anak-anak kecil ke bahu, atau sekadar membuka jalan bagi barisan buruh yang mulai lelah.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menyebut semua personel disebar di titik-titik strategis, dengan mengedepankan pendekatan yang tak biasa: humanis. "Tidak ada satu pun anggota kami yang membawa senjata api," katanya dalam keterangan tertulis pada Kamis, 1 Mei 2025. "Kami ingin pastikan bahwa buruh yang merayakan Hari Buruh Internasional tetap merasa aman dan dilayani."

Kata "dilayani" terasa janggal dalam konteks pengamanan. Tapi hari itu, kata itu justru menemukan maknanya.

Seluruh petugas, kata Susatyo, telah diberi arahan untuk bersikap ramah namun tegas, dengan menempatkan komunikasi sebagai pendekatan utama. "Kita layani saudara-saudara kita ini dengan ramah. Tegas, tapi tetap komunikatif. Supaya acara ini berjalan lancar dan sukses," ujarnya.

Berbagai pendekatan humanis dilakukan Polri demi kelancaran May Day 2025. Salah satunya di Balikpapan, peringatan Hari Buruh tampil dalam wujud yang jauh berbeda dari gambaran klasik aksi jalan. Suasana yang menyelimuti kota minyak ini pada 1 Mei justru hangat, bersahabat, dan penuh senyum.

Pagi itu, di lobi Markas Polresta Balikpapan, ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja berkumpul bukan untuk memprotes, tapi untuk menerima. Sebanyak 1.000 paket sembako dibagikan langsung oleh Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Anton Firmanto, dalam sebuah seremoni sederhana namun penuh makna.

"Ini bukan sekadar bantuan. Ini simbol kebersamaan–antara kami, aparat keamanan, dan para pekerja yang jadi tulang punggung kota ini," ujar Kombes Anton saat menyerahkan paket sembako secara simbolis kepada perwakilan buruh.



Ruang Dialog

Tak ada garis pemisah antara mereka yang berseragam dan mereka yang memakai rompi serikat. Sebaliknya, dialog hangat mengalir dalam forum silaturahmi antara Kapolresta dan para pimpinan buruh. Suara yang biasanya terdengar lantang dalam tuntutan kini berganti menjadi tawa dan apresiasi.

"Buruh itu bukan musuh, mereka bagian dari masyarakat

yang harus dilindungi," ucap Ipda Sangidun dari Humas Polresta Balikpapan. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini adalah cara kepolisian menunjukkan wajah baru dalam menyikapi Hari Buruh—lebih humanis, lebih mendekat.

Aksi humanis lainnya juga tampak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di Pos 9 dan NPCT 1, ratusan buruh dari Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia serta Forum Komunitas & Non-

Komunitas Pengemudi Bersatu berkumpul untuk memperingati May Day.

Namun, yang menarik bukan hanya kehadiran para buruh, melainkan sosok-sosok berseragam cokelat muda yang berdiri di garda depan: para Polwan dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan senyum ramah dan gerakan penuh empati, mereka bukan hanya hadir sebagai petugas keamanan, tetapi juga sebagai penghubung—





penjembatan suasana yang hangat antara aparat dan pekerja.

"Selamat Hari Buruh, Bapak-Bapak. Jangan lupa minum dulu, ya," sapa salah satu Polwan sambil menyerahkan sebotol air mineral dan sebungkus roti kepada seorang sopir kontainer yang tengah beristirahat.

Tak ada pagar pembatas. Tak ada pengeras suara yang menggema, yang terdengar justru tawa ringan dan percakapan hangat antara Polwan dan para buruh. Di bawah terik matahari siang, aksi sederhana ini terasa menyentuh.

"Polwan kami bertugas sebagai tim negosiator. Mereka bukan hanya menjaga situasi tetap kondusif, tapi juga hadir sebagai mitra dialog bagi buruh,"

"Polwan kami bertugas sebagai tim negosiator. Mereka bukan hanya menjaga situasi tetap kondusif, tapi juga hadir sebagai mitra dialog bagi buruh," ujar Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing.

Menurut Kapolres, pendekatan humanis seperti ini menjadi bagian dari strategi Polri dalam menciptakan pengamanan yang bukan hanya efektif, tetapi juga diterima dengan baik oleh masyarakat. "Kami tidak ingin sekadar menjaga, tapi juga menyapa. Memberi rasa aman itu lebih dari sekadar mengawasi," tambahnya.

Anarko Picu Kericuhan

Kendati Polri telah berupaya melakukan pendekatan humanis, kericuhan tetap tak terelakkan. Aksi damai yang awalnya digelar oleh buruh dan mahasiswa berubah menjadi ricuh akibat kehadiran sejumlah orang berpakaian serba hitam yang diduga berasal dari kelompok anarko.

Di Semarang, misalnya, aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah mulanya berlangsung tertib. Namun, situasi berubah drastis setelah sekelompok massa berpakaian hitam melemparkan potongan besi, kayu, dan batu ke



arah gedung. Aparat kepolisian pun segera bergerak untuk meredam situasi.

Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, menduga kelompok anarko telah menyusup dalam aksi tersebut. "Ada beberapa yang diamankan. Kami masih mendalami motif dan keterlibatan mereka," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12 Mei 2025).

Syahdudi menambahkan, kelompok itu juga melakukan aksi provokatif seperti pembakaran ban,

pelemparan botol, serta perusakan pagar. Aparat masih menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

Di Jakarta, buruh dari berbagai elemen memadati kawasan Gedung DPR/MPR RI sejak pagi hari. Dengan membawa poster dan kendaraan komando, mereka menyuarakan berbagai tuntutan ketenagakerjaan.

Namun, menjelang sore, suasana berubah tegang. Polisi membubarkan massa sekitar pukul 17.10 WIB setelah muncul dugaan

penyusupan oleh kelompok anarko. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, kelompok tersebut melakukan tindakan provokatif yang membahayakan warga.

"Pada pukul 16.12 WIB, massa di depan Resto Pulau Dua melempari kendaraan yang melintas di jalan tol. Tindakan ini membahayakan keselamatan pengguna jalan," ungkapnya.

Sebanyak 13 orang diamankan dalam insiden tersebut, terdiri dari

"Pada pukul 16.12 WIB, massa di depan Resto Pulau Dua melempari kendaraan yang melintas di jalan tol. Tindakan ini membahayakan keselamatan pengguna jalan,"





12 pria dan satu perempuan. Mereka diketahui membawa petasan dan terlibat dalam pelemparan batu serta aksi melawan aparat.

Sementara itu, di Bandung, kerusuhan terjadi saat massa membubarkan diri usai aksi peringatan May Day di Taman Cikapayang. Sekelompok orang berpakaian hitam tiba-tiba melakukan perusakan terhadap fasilitas taman.

Sekitar pukul 16.16 WIB, polisi turun tangan dan memukul mundur massa ke arah Jalan Dipatiukur. Di sepanjang jalan tersebut, terlihat pot bunga pecah, plang jalan dicabut, dan batu berserakan. Sebuah toko kopi di kawasan itu juga menjadi sasaran: dinding dan

kaca depannya dicoret dengan cat semprot.

"Saya nggak tahu awalnya gimana, tapi tiba-tiba massa merusak pot dan mencabut plang jalan. Lalu polisi datang dan membubarkan," kata Kris, warga Bandung yang menyaksikan kejadian di Jalan Dipatiukur.

Kerusuhan berlangsung sekitar 20 menit. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan, memastikan situasi telah kembali aman. "Saat ini kondisi sudah kondusif. Jalan Dipatiukur sudah bisa dilalui masyarakat," ujarnya. [*]

ANGIN SEGAR

bagi Kaum Pekerja

*Revisi Undang-Undang
Ketenagakerjaan kini
akan menjadi prioritas
pemerintah sebagai
tindak lanjut atas
putusan Mahkamah
Konstitusi.*



Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung acara peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di kawasan Monas. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dinilai membawa angin segar bagi dunia pekerja Indonesia.

Kepala Negara menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi para buruh. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk menciptakan sistem

ketenagakerjaan yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

"Kami akan bekerja keras, agar semua warga negara Indonesia bisa mendapat pelayanan kesehatan sebaik-baiknya dan bisa dapat obat yang semurah-murahnya, ini perjuangan kami. Kami sudah melihat, kami sudah menghitung, kekayaan Bangsa Indonesia begitu besar," kata Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan kini menjadi

prioritas pemerintah. Langkah ini disebut sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.

Tak berhenti di situ, Presiden juga mengungkapkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang akan diisi oleh tokoh-tokoh buruh dari berbagai elemen di seluruh Indonesia. Dewan ini diharapkan menjadi wadah dialog strategis antara pemerintah dan pekerja dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan.



Langkah progresif lainnya adalah dorongan Presiden untuk menghapus sistem outsourcing yang selama ini menjadi sorotan tajam kalangan buruh, serta percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang telah tertunda selama lebih dari dua dekade.

Presiden juga berencana membentuk Satuan Tugas PHK, yang bertugas mengawasi proses pemutusan hubungan kerja dan memberikan perlindungan kepada pekerja yang terdampak.

“Ini bukan sekadar simbol, tapi wujud komitmen nyata dari Presiden untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja dan mendorong kesejahteraan buruh Indonesia,”



Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyampaikan terus bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Ia juga menegaskan mendukung Undang-undang Perampasan Aset yang menjadi salah satu tuntutan para buruh dan pekerja pada momentum ini.

“Saya mendukung undang-undang perampasan aset, saya mendukung. Enak aja udah nyolong ga mau mengembalikan aset,” tegasnya.

Langkah Positif
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyambut positif langkah Presiden yang dinilai menunjukkan keberpihakan terhadap nasib buruh.

“Ini bukan sekadar simbol, tapi wujud komitmen nyata dari Presiden untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja dan mendorong kesejahteraan buruh Indonesia,” ujar Cucun dalam keterangannya, Jumat 2 Mei 2025.

Menurut Cucun, komitmen-komitmen yang disampaikan





langsung oleh Presiden di hadapan ribuan buruh bukan hanya patut diapresiasi, tapi juga menjadi harapan baru untuk terciptanya hubungan industrial yang lebih adil dan berkelanjutan.

"Komitmen-komitmen ini merupakan angin segar. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa mereka mendengar dan bertindak atas suara buruh," kata Cucun.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa negara memiliki tanggung

jawab konstitusional untuk hadir menciptakan relasi kerja yang berkeadilan. Dalam konteks ini, DPR, kata Cucun, siap bersinergi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk memastikan hak-hak pekerja dijaga dan diperjuangkan.

"Dalam fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan, DPR terus berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan buruh. Ini adalah bagian dari janji konstitusi yang tidak boleh dilupakan," pungkasnya.



Tak Sekadar Seremonial

Bagi sebagian orang, May Day tahun ini mungkin terlihat sebagai perayaan yang "dipoles." Dengan Presiden hadir, aparat tanpa senjata, dan suasana lebih damai dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tapi bagi buruh seperti Ria, Hendi, dan Syaifudin, hari itu lebih dari sekadar seremoni. Ia menjadi ruang yang, walau sebentar, membuat mereka merasa dilihat sebagai manusia, bukan sekadar nomor induk pekerja.

Apakah semua akan berubah setelah ini? Tak ada yang tahu pasti. Revisi undang-undang masih harus menempuh jalan panjang, dialog tripartit masih butuh ruang yang adil, dan nasib buruh tak bisa diukur dari satu pidato.

Namun, di antara segala kemungkinan dan keraguan, ada satu keping perasaan yang dibawa pulang: bahwa untuk satu hari dalam setahun, negara mendengar, negara hadir, dan negara—meski sebentar—menundukkan kepala di tengah suara massa.

Dan di saku seorang buruh perempuan dari Garut, bendera kecil itu tetap tersimpan. Seperti menanti waktu yang tepat untuk kembali dikibarkan. Kali ini, bukan hanya sebagai simbol perayaan, tapi juga pengingat bahwa janji pernah diucapkan. [*]





NGKAP KASUS

BARESKRIM Sita Rp 530 Miliar Uang Judi Online

Para tersangka menggunakan jaringan perusahaan cangkang untuk mengalirkan uang yang didapat dari hasil judi online



Bareskrim Polri membongkar jaringan judi online yang menyamarkan uang haramnya lewat perusahaan cangkang. Total Rp 530 miliar mengalir melalui ribuan rekening dan puluhan bank.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada mengumumkan penangkapan dua tersangka kasus judi online. Keduanya bukan pemain kecil.

Mereka adalah OHW, Komisaris PT A2Z Solusindo Teknologi, dan H, sang direktur. Polisi menduga keduanya menjadi dalang aliran dana ratusan miliar rupiah dari sejumlah situs judi online

yang dikaburkan lewat jaringan perusahaan cangkang.

"Modus ini sedang marak. Mereka menggunakan *payment gateway*, *virtual account*, *QRIS*, bahkan mata uang kripto untuk menyamarkan uang hasil judi," kata Wahyu. Ia menyebut ini sebagai salah satu bentuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) berbasis digital yang paling kompleks yang pernah mereka tangani.

Uang hasil judi dikumpulkan dari deposit dan penarikan para pemain di situs-situs ilegal, lalu dimasukkan ke perusahaan anak bernama PT TJC, yang merupakan bagian dari

PT AST. Dari perusahaan itu, uang kembali mengalir naik ke pemilik sebenarnya.

Pola ini tidak berhenti sampai di situ. Menurut penyidik, dana yang terkumpul kemudian dilapis (*layering*) ke sejumlah rekening lain, digunakan untuk membeli obligasi, hingga disamarkan dalam transaksi investasi palsu.

"Total yang kami sita sejauh ini Rp530 miliar," kata Wahyu. Uang tersebut tersebar di 4.656 rekening dari 22 bank berbeda. Jumlah yang besar, dengan alur yang dibuat sekompelks mungkin agar menyulitkan pelacakan.

APAN TERSANGKA DAN PENYITAAN LAM RANGKA PENYIDIKAN PERKARA K PIDANA PENCUCIAN UANG DARI K PIDANA ASAL PERJUDIAN ONLINE





Situs Terafiliasi

Kasus ini juga mengungkap keterlibatan 12 situs judi online. Wahyu menyebutnya sebagai "slot-slot" terafiliasi yang semua transaksinya diarahkan ke jaringan perusahaan yang didirikan di Indonesia.

Menariknya, salah satu tersangka, OHW, ternyata bukan orang baru dalam dunia perjudian. Pada 2007 silam, ia pernah diproses hukum dalam kasus serupa—meski belum dalam bentuk judi online seperti sekarang.

Keduanya ditangkap pada malam 6 Mei 2025. Polisi juga menyita berbagai aset, dan berharap perusahaan-perusahaan fiktif yang mereka dirikan tak lagi bisa beroperasi. "Kami ambil uangnya, kami sita asetnya, dan akan kami serahkan ke negara," ujar Wahyu.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar.

Mereka adalah warga negara Indonesia yang saat ini telah ditahan, sementara seluruh dana hasil kejahatan akan diamankan melalui rekening penampungan khusus milik Bareskrim.

"Semua barang bukti ini akan kami titipkan di rekening penampungan dan dikelola secara resmi, sebelum nantinya diserahkan ke kas negara," kata Wahyu menutup konferensi.

JUMLAH UANG DARI PERJUDIAN ONLINE

2025



“Mereka punya sistem sendiri yang sangat kompleks. Tapi kami juga punya sistem yang kini sudah terkoneksi dengan mereka. Dari situlah kami bisa merekam aliran dana ini,”

Omset Rp47 Triliun

Di tengah maraknya pemberantasan judi online, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis data mengejutkan: dalam rentang Januari hingga Maret 2025 saja, perputaran uang dari praktik judi online menyentuh angka Rp47 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan temuan itu di Mabes Polri, Rabu, 7 Mei 2025. Ia menjelaskan bahwa uang tersebut mengalir melalui ratusan bank dan ribuan kanal transaksi digital, dari payment gateway hingga sistem keuangan berbasis kripto.

“Mereka punya sistem sendiri yang sangat kompleks. Tapi kami juga punya sistem yang kini sudah terkoneksi dengan mereka. Dari situlah kami bisa merekam aliran dana ini,” ujar Ivan kepada wartawan.

Namun, menurutnya, angka itu justru mencerminkan keberhasilan penegakan hukum dalam menekan perputaran uang haram. Pada periode yang sama tahun lalu, perputaran uang judi online sempat menembus angka Rp90 triliun.

“Jadi kuartal pertama 2024 itu Rp90 triliun. Sekarang berhasil ditekan jadi di bawah Rp 50 triliun,” kata Ivan. Ia menyebut penurunan ini sebagai hasil nyata dari kerja sama antar lembaga, mulai dari kepolisian hingga lembaga keuangan.

Meski angka Rp47 triliun terdengar seperti “keberhasilan”, Ivan mengingatkan bahwa perputaran uang sebesar itu tetap menunjukkan besarnya skala masalah. Apalagi, dampak sosial dari judi online terbukti menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

“Banyak adik-adik kita tidak bisa bayar sekolah. Ada yang bunuh diri karena terjerat pinjaman online usai kalah judi. Rumah tangga berantakan, perceraian meningkat, bahkan ada yang tidak bisa makan,” ucap Ivan dengan suara tegas.

Menurutnya, dampak judi online tidak hanya soal kerugian finansial. Ini adalah masalah moral, psikologis, dan struktural yang meluas dalam diam. Ia menyebutkan bahwa penyelidikan yang dilakukan PPATK kerap kali menemukan pola penyamaran dana, pembelian aset, hingga layering melalui perusahaan-perusahaan fiktif.

“Judi online merusak sistem keuangan dan menghancurkan masa depan generasi kita. Ini bukan hanya tugas aparat, tapi panggilan bagi kita semua untuk tidak tutup mata,”

Merusak Sistem Keuangan

Ivan menekankan pentingnya peran semua pihak untuk membendung praktik ini. Bukan hanya aparat penegak hukum, tapi juga masyarakat sipil, penyedia layanan keuangan, hingga institusi pendidikan.

“Judi online merusak sistem keuangan dan menghancurkan masa depan generasi kita. Ini bukan hanya tugas aparat, tapi panggilan bagi kita semua untuk tidak tutup mata,” katanya.

PPATK memastikan akan terus melacak aliran dana mencurigakan, memperluas jangkauan pemantauan terhadap sistem transaksi digital, dan memberikan peringatan dini terhadap aktivitas ilegal yang terhubung ke judi online. [*]

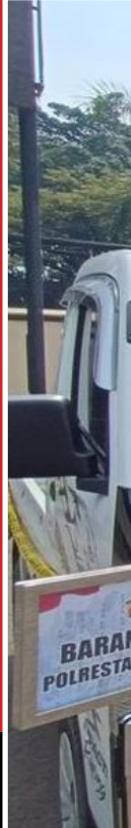


U

NGKAP KASUS



POLISI BONGKAR Markas Mata Elang, Ratusan Motor Disita





Operasi pemberantasan premanisme kembali digalakkan Polri. Kali ini, aparat gabungan dari Polres Bogor dan Polresta Bogor Kota menyasar praktik mata elang atau debt collector jalanan yang kerap meresahkan warga.

Dalam penggerebekan di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jumat, 9 Mei 2025, polisi menyita 120 unit sepeda motor dari tangan para pelaku. Sebanyak sembilan orang ditangkap dalam operasi itu. Mereka diduga kuat terlibat dalam aktivitas perampasan kendaraan bermotor dengan mengatasnamakan penagihan kredit.

Penindakan ini merupakan bagian dari operasi penertiban yang digelar selama sepekan terakhir oleh aparat gabungan dua kepolisian wilayah.

Polres Bogor berhasil menyita 80 motor dari satu titik di Gunung Putri. Sementara itu, Polresta Bogor Kota mengamankan 30 unit lainnya dari lokasi berbeda.

Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menyebut, para pelaku menggunakan berbagai modus dalam menjalankan aksinya. Salah satu yang paling mencolok adalah pemanfaatan data konsumen yang bocor dari lembaga pembiayaan.

"Mereka menghentikan korban di jalan, lalu secara sepihak menyita motor, dengan mengaku punya akses data nasabah," kata Rio kepada wartawan.

Menurutnya, tindakan semacam ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merusak iklim investasi dan rasa aman masyarakat. Aparat, tegas Rio, tak akan membiarkan praktik premanisme berkedok penagihan kredit merajalela.

Sudah Lunas

Arif, 34 tahun, adalah salah satu warga yang baru-baru ini menjadi korban. Ia dicegat sekelompok orang saat melintas di kawasan Tajur, Kota Bogor. Tanpa perlawanannya, ia dipaksa menyerahkan sepeda motornya, meski cicilan kendaraan itu telah lunas sejak beberapa bulan lalu. "Saya dicegat ramai-ramai. Saya sudah bilang kalau motor saya sudah lunas, tapi mereka tetap ambil juga," kata Arif.

Ia kemudian melaporkan peristiwa itu ke kepolisian. Tak berselang lama, jajaran Polres Bogor menindaklanjuti laporan tersebut. Arif pun mengaku lega. "Saya apresiasi polisi yang cepat tanggap. Semoga tidak ada lagi yang jadi korban."





Aksi matel yang meresahkan masyarakat juga terjadi di Bekasi. Sore itu, Selasa, 6 Mei 2025, pria berinisial T baru saja memarkir kendaraannya di kawasan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Tanpa banyak aba-aba, sekelompok orang mendekatinya. Salah satu dari mereka mengaku sebagai penagih utang. Namun, alih-alih menunjukkan dokumen resmi, mereka justru mengeroyok T dan merampas mobilnya.

Pelakunya, seorang pria bernama EHO, 39 tahun. Setelah ditangkap, diketahui EHO ternyata tak memiliki sertifikasi maupun legalitas untuk menjalankan tugas tersebut.

"Pelaku bekerja sebagai debt collector selama empat tahun, tapi tidak punya sertifikasi dari PT ACC ataupun surat penarikan yang

dikeluarkan pengadilan," ujar Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Kusumo Wahyu Bintoro dalam keterangan tertulis, Sabtu, 18 Mei 2025.

Dalam bisnis liar penarikan kendaraan ini, EHO mendapatkan bagiannya. Dari total fee sebesar Rp22 juta yang diberikan perusahaan setelah mobil dirampas, EHO hanya kebagian Rp1,5 juta. Sisanya disedot oleh pihak perusahaan dan pelaku lain yang saat ini masih buron, berinisial EL. "Pelaku lain atas nama EL masih dalam pencarian. Kita masukkan dalam daftar pencarian orang (DPO)," kata Kusumo.

Polisi menduga sistem kerja debt collector tak resmi ini berjalan secara struktural. Pelaku mendapatkan perintah, eksekusi dilakukan di lapangan, lalu uang disetor kepada atasan.





Tak Punya Kewenangan

Aksi penarikan kendaraan oleh matel seperti EHO menabrak hukum dari banyak sisi. Dalam banyak kasus, korban tidak diberi pemberitahuan resmi, tak dilibatkan proses hukum, dan terjebak dalam situasi penuh intimidasi.

Padahal, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung dan Otoritas Jasa Keuangan, penarikan kendaraan dari debitur yang bermasalah harus dilakukan melalui prosedur sah: melalui pengadilan atau pihak berwenang yang punya legalitas. Tanpa itu, penarikan kendaraan tergolong perampasan.

Kepolisian menegaskan bahwa operasi ini bukan sekadar sweeping, melainkan upaya membongkar praktik sistemik yang mencederai hukum. Para pelaku akan diberat dengan pasal-pasal pidana terkait perampasan dan pencurian dengan kekerasan.

Lebih dari itu, penertiban ini menjadi sinyal tegas bagi para pelaku usaha pembiayaan agar tidak menyerahkan urusan penagihan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan hukum. [*]



Cara Menghadapi *Debt Collector*

1. Tanyakan identitasnya dan catat.
2. Tanyakan kartu sertifikasi profesi dari APPI yang berfungsi sebagai surat izin menagih.
3. Tanyakan surat kuasa dari perusahaan *finance*.
4. Tanyakan Surat Jaminan Fidusia atau salinan.
5. Tolak baik-baik, jika *debt collector* tetap ngotot minta bantuan petugas polisi.



POLISI

Oplosan Gas Subsidi **Rugikan Negara Miliaran Rupiah**

Praktik mengoplos gas bersubsidi memicu kelangkaan dan membuat harga naik di sejumlah daerah.



Dari luar, pangkalan gas itu tampak biasa. Sebuah bangunan sederhana di Dusun Krajan, Telagasari, Karawang, Jawa Barat. Tapi di balik pintunya, regulator dan selang modifikasi bekerja tanpa henti.

Tabung gas melon 3 kilogram bersubsidi dipindahkan isinya ke tabung 12 kilogram yang lebih besar, lebih mahal, dan seharusnya tidak diisi dengan gas bersubsidi.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini kejahatan

terstruktur,” kata Brigadir Jenderal Nunung Syaifuddin, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Senin, 5 Mei 2025.

Pengungkapan kasus ini berawal dari kelangkaan gas subsidi di sejumlah wilayah. Masyarakat mengeluhkan tabung melon yang susah dicari dan harga yang mulai naik. Informasi itu masuk ke telinga penyidik. Penelusuran pun dilakukan. Hasilnya, praktik pengoplosan terdeteksi berbagai lokasi berbagai

lokasi yakni di Karawang (Jawa Barat), Banyumanik, Semarang (Jawa Tengah), dan Temanggung (Jawa Tengah).

Berbeda dari pola lama-pelaku biasa membeli gas dari pangkalan, lalu mengoplos di tempat lain-kali ini justru pangkalanlah yang bermain. “Mereka langsung melakukan penyuntikan di lokasi. Tidak perlu perantara,” kata Nunung.

Di Karawang, polisi menetapkan satu orang tersangka: TN alias E. Ia bukan sekadar pelaku lapangan,

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini kejahatan terstruktur,”



tapi pemodal dan pemilik pangkalan. Polisi menyita 386 tabung gas dari lokasi milik TN, terdiri dari tabung 3 kg, 5,5 kg, hingga 12 kg. Juga disita alat suntik modifikasi, mobil pikap, dan buku catatan distribusi.

Pengungkapan di Semarang tak kalah mencengangkan. Gudang pangkalan di Jalan Perintis Kemerdekaan menjadi tempat operasi besar-besaran. Tiga orang ditangkap: FZSW alias A (pemodal), DS, dan KKI yang berperan sebagai operator pengoplosan.

Barang bukti yang diamankan lebih dari 4.000 tabung gas, termasuk tabung jumbo 50 kilogram. Juga ditemukan segel-segel palsu, plastik es batu, selang, hingga truk untuk distribusi.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan teknik khusus. Gas dari empat tabung 3 kg disuntikkan ke satu tabung 12 kg menggunakan regulator yang dimodifikasi.

Untuk mempercepat perpindahan isi, mereka menggunakan es batu. "Efek pendinginan memperlancar proses pemindahan gas," ujar Nunung.

Setelah itu, tabung hasil oplosan dijual ke masyarakat dengan harga gas nonsubsidi. Namun, volumenya tidak sesuai standar karena sebagian gas menguap atau sengaja dikurangi.

Pengungkapan serupa juga terjadi di Temanggung, Jawa Tengah. Polisi berhasil membongkar praktik curang pengoplosan gas LPG subsidi yang beroperasi secara diam-diam di area peternakan ayam. Dari penggerebekan tersebut, empat tersangka ditangkap berikut barang bukti ratusan tabung gas dan alat bantu pengoplosan.

Para pelaku terdiri dari J (46), warga Desa Ketitang, Kecamatan Jumo, yang diketahui sebagai otak dari operasi ini. Ia dibantu oleh



ANTARA

tiga pekerja: WS (26) dan MF (36), warga Desa Lempuyang, Kecamatan Candiroti, serta MBA (26), asal Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung, Jawa Timur.

"J-lah yang pertama kali menggagas pengoplosan gas dari tabung subsidi 3 kg ke tabung 12 kg non-subsidi," kata Kapolres Temanggung, AKBP Rully Thomas, saat konferensi pers, Kamis 15 Mei 2025.

Menurut pengakuan J, ia mendapatkan informasi tentang penjualan tabung subsidi dari media sosial Facebook, kemudian mengumpulkan tabung untuk dipindahkan ke lokasi pengoplosan yang terletak di Dusun Kudon, Desa Semen, Kecamatan Wonoboyo.

Dari lokasi pengoplosan, petugas menyita total 812 tabung LPG. Rinciannya meliputi 487 tabung ukuran 3 kg (83 kosong dan 404 berisi), serta 325 tabung ukuran 12 kg (143 terisi dan 182 kosong).

Selain itu, polisi juga menemukan 18 batang pipa besi sebagai alat suntik, dua kompor, dua drum logam, satu timbangan digital, dan sejumlah perlengkapan lain seperti 256 karet seal bekas dan 350 segel tabung 12 kg berwarna kuning.

"Pengoplosan dilakukan dengan metode penyuntikan isi gas dari empat tabung 3 kg ke satu tabung 12 kg menggunakan regulator yang dimodifikasi," jelas Rully.

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa praktik ilegal ini telah berlangsung sejak 2 Januari 2025 dan dilakukan dua kali setiap minggu hingga April. Artinya, selama hampir empat bulan, ratusan tabung berhasil dioplos dan didistribusikan ke luar daerah.

Rully menyebut, setelah proses pengoplosan selesai, tabung 12 kg hasil oplosan tersebut dikirim ke Bandung, Jawa Barat. Pembelinya dikenal berinisial P. Setiap tabung dijual seharga Rp 140 ribu, dengan keuntungan bersih sekitar Rp 25 ribu per tabung bagi para pelaku.

Bagi pelaku, usaha ini sangat menguntungkan. Di Karawang saja, tersangka TN meraup untung sekitar Rp 106 juta per bulan. Jika dihitung selama setahun, omzetnya mencapai Rp 1,2 miliar. Namun, kerugian negara jauh lebih besar. Dalam enam bulan praktik ini berjalan, kerugian subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat miskin mencapai Rp 5,6 miliar.

"Ini bukan hanya soal keuntungan ilegal, tapi juga soal hak masyarakat yang dirampas. Gas subsidi itu untuk rumah tangga kecil, bukan untuk dijual kembali dengan harga mahal," ujar Nunung.

Dittipidter Bareskrim Polri juga menetapkan 10 tersangka yang diduga menyelewengkan LPG 3 kilogram bersubsidi di Jakarta. Ke-10 tersangka tersebut berasal dari dua TKP yakni di Jakarta Utara dan Jakarta Timur.



"Ini bukan hanya soal keuntungan ilegal, tapi juga soal hak masyarakat yang dirampas. Gas subsidi itu untuk rumah tangga kecil, bukan untuk dijual kembali dengan harga mahal,"



Modus yang dilakukan para tersangka adalah mengambil, mengangkut, dan memindahkan atau menyuntikkan isi LPG 3 kilogram bersubsidi ke dalam tabung LPG 12 kilogram nonsubsidi.

Dari TKP di Jakarta Utara penyidik menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 699 tabung gas, enam buah regulator pendek, satu bungkus lem selang, lima buah kantong besar berisi tutup segel berkode tabung warna kuning, dan satu buah kantong kecil yang berisi karet atau seal tabung gas.

Sementara itu dari Jakarta Timur modus operandi para tersangka adalah membeli dan mengangkut LPG 3 kilogram yang bersubsidi dari warung-warung atau pangkalan LPG sekitar Jakarta Timur. Lalu, isi LPG subsidi tersebut disuntikkan atau dipindahkan ke tabung gas LPG nonsubsidi dengan ukuran 12 kilogram, 50 kilogram, dan 5,5 kilogram, serta menjualnya di berbagai wilayah di Jakarta.

Dari kedua kasus di Jakarta, polisi memperkirakan negara diduga mengalami kerugian sejumlah Rp 16,8 miliar.

A silhouette of a construction site at sunset. In the center is a tall tower crane. To its left, several vertical steel poles are standing. In the foreground, the silhouettes of several construction workers are visible, some carrying tools. The background is a warm, orange and yellow sunset.

‘Palak’ Kontraktor Asing, Berujung Menjadi Tersangka

Pada pengusaha itu meminta jatah proyek senilai hingga Rp 5 triliun tanpa melalui proses lelang yang semestinya.



Di balik gemerlap proyek-proyek investasi berskala triliunan rupiah, ada ancaman tersembunyi yang tak kalah serius: premanisme yang diam-diam menyelinap masuk ke dunia usaha dan menggerogoti iklim investasi.

Kasus dugaan pemerasan oleh Ketua Kadin Cilegon terhadap kontraktor proyek raksasa PT Chandra Asri Alkali menjadi contoh nyata bagaimana praktik ini bukan hanya meresahkan, tapi juga mengancam kepastian hukum dan stabilitas ekonomi nasional. Negara pun turun tangan, dan Polri berada di garis depan dalam upaya bersih-bersih yang telah lama ditunggu.

Polisi menahan Ketua Kadin Kota Cilegon, Muhammad Salim (54), atas dugaan pemerasan terhadap PT Chandra Asri Alkali (CAA). Ia diduga meminta jatah proyek senilai Rp 5 triliun tanpa melalui proses lelang.

Kasus ini mencuat setelah sebuah video beredar luas di media sosial X (sebelumnya Twitter). Dalam video itu terlihat sekelompok orang yang mengaku dari Kadin Cilegon dan sejumlah ormas tengah bertemu dengan perwakilan PT Chengda Engineering Co, kontraktor proyek pabrik CA-EDC.

Seorang pria berbaju putih dalam video itu terdengar menyebutkan permintaan proyek hingga Rp5 triliun. "Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas, Rp5 triliun untuk Kadin," ucap pria yang mengaku sebagai anggota Kadin Cilegon.

Wakil Ketua Umum I Kadin Cilegon, Isbatullah Alibasja, mengonfirmasi bahwa sebelumnya memang ada pertemuan antara Kadin dan para investor, termasuk PT CAA serta kontraktor utama proyek senilai Rp 15 triliun tersebut.



Menurut Isbatullah, Kadin Cilegon telah beberapa kali berdiskusi dengan pemilik proyek dan kontraktor utama, seperti PT Chengda (yang bekerja sama dengan PT Total Persada) serta PT PP JO dan Seven Gate Indonesia. Pertemuan itu bertujuan agar pengusaha lokal bisa dilibatkan dalam proyek pembangunan.

Namun, komunikasi dengan PT Chengda disebut tidak berjalan lancar. "Mereka sulit diajak bicara, mungkin karena kendala bahasa atau budaya. Karena itu kami inisiatif untuk mengunjungi lokasi proyek," jelas Isbatullah.

Di lokasi, suasana memanas karena sudah banyak pengusaha lokal dari berbagai

organisasi yang berkumpul. Ketegangan meningkat ketika pihak Chengda terus menyebut bahwa keputusan ada di tangan PT CAA, sementara CAA sebelumnya sudah menyatakan dukungan keterlibatan pengusaha lokal.

Adu mulut pun terjadi. Salah satu anggota Kadin mengucapkan kalimat dalam video yang kemudian viral. Isbatullah menegaskan bahwa pernyataan itu bukan sikap resmi Kadin, melainkan luapan emosi pribadi.

Tiga Tersangka

Polda Banten menetapkan Muhammad Salim sebagai tersangka dan langsung menahannya. Selain Salim, dua orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ismatullah (39), Wakil Ketua Kadin Bidang Industri, dan Rufaji Jahuri (50), Ketua HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Cilegon.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten Kombes Dian Setyawan menjelaskan bahwa Salim berperan menggerakkan massa untuk mendatangi proyek PT Chengda. Ismatullah disebut sempat menggebrak meja saat meminta jatah proyek, sementara Rufaji mengancam akan menghentikan proyek jika organisasinya tidak dilibatkan.





Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya screenshot ajakan dari Salim kepada saksi untuk mendatangi lokasi proyek, surat resmi Kadin kepada PT Chengda tertanggal 8 April dan 8 Mei 2025, dan notulen pertemuan pada 8 dan 22 April 2025.

Kadin Indonesia merespons cepat dengan menonaktifkan keanggotaan Muhammad Salim dan jajaran yang terlibat. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah hukum yang diambil polisi.

"Kami menyesalkan peristiwa ini karena telah menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu," ujar Anindya dalam pernyataan resminya, Minggu 18 Mei 2025.

Sementara, Polda Banten menyatakan penyidikan kasus ini masih terus berjalan. Kemungkinan adanya tersangka baru terbuka lebar.

"Sudah ada 22 saksi yang kami periksa, termasuk ahli pidana. Kami juga akan memeriksa PT Total sebagai subkontraktor PT Chengda," ujar Kombes Dian Setyawan, Selasa 20 Mei 2025.

Menurut Dian, sejauh ini pemerasan baru terindikasi dilakukan terhadap PT Chengda sebagai kontraktor utama. Belum ada laporan keterlibatan perusahaan lain dalam praktik serupa. [*]



DVI POLD A PAPUA BARAT

Berhasil Identifikasi 15 Korban Banjir di Pegunungan Arfak

Beberapa jenazah mudah dikenali namun lainnya mengalami kesulitan sebab kondisi jenazah korban sudah membusuk dan dipenuhi dengan material longsor.



Tim dari Disaster Victim Identification (DVI) dan INAFIS Polda Papua Barat berhasil

mengidentifikasi seluruh jenazah korban bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Pegunungan Arfak.

Tercatat hingga Sabtu 24 Mei 2025, 15 jenazah telah diterima Tim DVI dan seluruh korban telah berhasil diidentifikasi. Seluruh jenazah tersebut sudah diserahkan kepada keluarga.

Kabid Dokkes Polda Papua Barat Kombes Pol. dr. Iskandar, menyampaikan apresiasi dan empati kepada keluarga korban atas musibah ini. Ia juga menambahkan bahwa proses identifikasi dilakukan secara profesional, teliti, dan dengan prinsip humanis.

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga korban. Tim DVI dan INAFIS Polda Papua Barat bekerja

makimal, cepat, dan tetap akurat untuk memastikan identitas korban dapat diketahui dengan pasti dan diserahkan kepada keluarga dengan hormat," kata Kombes Pol. dr. Iskandar.

Dirinya mengakui bahwa ada sejumlah kendala yang dihadapi Tim DVI ketika melakukan proses identifikasi secara visual maupun identifikasi data primer, sebab kondisi jenazah korban sudah membusuk dan dipenuhi dengan material longsor.

Dijelaskan oleh Kabid Dokkes beberapa jenazah mudah dikenali namun lainnya sangat sulit sehingga membutuhkan waktu untuk melanjutkan proses identifikasi sesuai tahapan yang sesuai dengan ketentuan DVI.

"Yang paling krusial itu karena kondisi jenazah bukan jenazah baru. Keseluruhan jenazah yang kami terima ada 14 jenazah," kata dia.



Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kampung Jim Meyes di Distrik Catubouw, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Banjir terjadi pada Jumat, 16 Mei 2025, sekitar pukul 21.00 WIT, usai hujan deras selama hampir tujuh jam. Derasnya aliran air menghantam lokasi kemah para penambang emas tradisional, hingga menyeret tenda dan peralatan mereka. Akibat bencana tersebut tercatat 24 orang menjadi korban dengan 19 orang dinyatakan dalam pencarian, empat orang selamat, dan satu orang dilaporkan meninggal dunia.

Untuk menemukan para korban Tim SAR mengerahkan 96 personel gabungan yang terdiri dari Basarnas 15 personel, dan Polres Pegunungan Arfak 30 personel, Kodim 1812/ Pegunungan Arfak 21 personel, Polda Papua Barat 17 personel, BPBD Provinsi Papua Barat 10 personel, dan BPBD Kabupaten Pegunungan Arfak 3 personel.

Tim SAR dibagi menjadi empat tim yaitu, dua tim pencari, satu tim evakuasi, dan satu tim bertindak sebagai pemantau cuaca. Dalam

upaya pencarian tersebut Tim SAR berhasil menemukan 15 korban yang tertimbun material longsor. Korban lantas dievakuasi menggunakan ekskavator dan kemudian dibawa menuju Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua Barat untuk dilakukan proses identifikasi.

Pada kesempatan pertama Tim DVI Biddokes dan Tim Inafis Ditreskrimum Polda Papua Barat berhasil mengidentifikasi lima korban yang langsung diserahkan ke masing-masing keluarga korban pada 19 Mei 2025.

Sehari berikutnya, Tim DVI kembali menerima tiga jenazah untuk diidentifikasi dan begitu proses identifikasi tuntas, korban segera diserahkan kepada pihak keluarga.

Pada proses berikutnya enam jenazah kembali diserahkan Tim SAR untuk diidentifikasi namun harus menunggu pelaksanaan gelar rapat rekonsiliasi untuk mencocokkan data antemortem sekunder maupun post mortem primer.

Sementara itu, Tim SAR gabungan masih terus melanjutkan pencarian empat





korban yang dinyatakan hilang. Proses pencarian dihadapkan pada berbagai tantangan berat seperti medan yang terjal dan sulit diakses, cuaca yang tidak menentu, arus sungai yang deras, hingga keterbatasan alat dan jaringan komunikasi menjadi hambatan serius di lapangan. Selain itu, kondisi suhu yang sangat dingin pada malam hari turut memengaruhi stamina dan personel Tim SAR.

Untuk mendukung kelancaran proses pencarian dan evakuasi saat ini beberapa kebutuhan mendesak sudah diidentifikasi. Termasuk di antaranya adalah makanan dan minuman untuk personel, alat bantu komunikasi dan penerangan, alat pelindung diri (APD), perlengkapan tidur, kendaraan operasional, ambulans jenazah, bahan bakar, serta alat berat untuk akses dan pencarian di medan sulit.

BPBD Kabupaten Pegunungan Arfak bersama pihak terkait terus berkoordinasi secara intensif guna memastikan penanganan darurat berjalan optimal. [*]



NOVASI

Hoegeng Awards 2025:

Menjaga Integritas Pemilihan Polisi Teladan

Seluruh proses seleksi ini dijalankan secara independen tanpa intervensi pihak mana pun, berkat komitmen dan integritas Dewan Pakar Hoegeng Awards 2025.



Proses seleksi Hoegeng Awards 2025 telah sampai pada tahap penting. Lima belas anggota polisi dari berbagai wilayah Indonesia telah terpilih sebagai finalis, mewakili tiga terbaik dari lima kategori yang dipertandingkan.

Berikut 3 besar kandidat polisi teladan dalam 5 kategori:

Kandidat Polisi Berintegritas yakni AKBP Seminar Sebayang, Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulteng, Kompol Reny Arafah siswa S2 PTIK dan Brigjen Arief Adiharsa Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri.

Untuk kandidat Polisi Inovatif berhasil diraih Aiptu Karyanto Bhabinkamtibmas Kelurahan Mentaos, Polsek Banjarbaru Kota, Polres Banjarbaru, Polda Kalsel, Iptu Andi Sri Ulva Baso Paur Fasmat SBST Subdit Regident Ditlantas Polda dan AKBP Condro Sasongko Kapolres Serang Banten.

Sedangkan untuk Kandidat Polisi Pelindung Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan berhasil dipilih kandidat yakni Kombes Retno Prihawati yang merupakan Atase Polri di Manila, Filipina, Kombes Rita Wulandari Kasubdit 1 Dittipid PPA PPO Bareskrim Polri dan AKBP Ni Made Pujewati Kasubdit Renakta Polda Nusa Tenggara Barat.

Kandidat Polisi Berdedikasi yakni Kompol Tatang Yulianto Kasubbag Pullahjianto Bagdalops Roops Polda Maluku, Aipda I Gede Arya Suantara Bhabinkamtibmas Desa Gontoran, Polres Mataram, Polda NTB dan Aipda Rahmad Muhajirin Bhabinkamtibmas Kelurahan Ledok Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur.



Sementara untuk Kandidat Polisi Tapal Batas dan Pedalaman terpilih Bripka Batias Yikwa Banit 3 Satreskrim Polres Keerom, Polda Papua, Bripka Annas Bhabinkamtibmas Banawa Selatan, Polres Donggala, Polda Sulawesi Tengah, dan Bripka Riri Herlianto Bhabinkamtibmas Polsek Hantakan, Polres Hulu Sungai Tengah, Polda Kalimantan Selatan.

Seluruh proses seleksi ini dijalankan secara independen tanpa intervensi pihak mana pun, berkat komitmen dan integritas Dewan Pakar Hoegeng Awards 2025.

Rapat penentuan finalis digelar secara hybrid-luring di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, dan daring melalui platform online-pada Kamis, 8 Mei 2025. Lima sosok dari latar belakang hukum, HAM, parlemen, dan masyarakat sipil menjadi penjaga objektivitas dan integritas seleksi ini.

Dari lima sosok profil anggota Dewan Pakar Hoegeng Awards 2025 adalah:

Alissa Qotrunnada Wahid

Putri sulung Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ini telah lama dikenal sebagai penggerak dialog lintas agama dan pejuang demokrasi. Sebagai Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia, Alissa memimpin ribuan aktivis yang mendorong penguatan nilai-nilai toleransi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Menurut Alissa, ajang ini penting untuk membangun hubungan saling percaya antara masyarakat dan polisi.

“Kami ingin masyarakat bisa memberikan apresiasi kepada polisi, agar mereka termotivasi meningkatkan pelayanan. Polisi perlu tahu, masyarakat punya ruang untuk menilai dan menghargai mereka,” ujarnya.



Putu Elvina

Sebagai Wakil Ketua Komnas HAM RI, Putu Elvina dikenal atas kiprahnya dalam pendidikan dan penyuluhan HAM. Lulusan Magister Manajemen Universitas Internasional Batam ini sebelumnya menjabat dua periode sebagai anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat dan juga KPAID Provinsi Kepri.

“Kami berharap Hoegeng Awards mendorong lahirnya polisi yang tidak hanya profesional, tetapi juga punya dedikasi tinggi pada pelayanan publik. Polisi harus menjadi teman terbaik masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” tutur Putu.

Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M.

Dikenal dengan sapaan “Otta”, praktisi hukum ini memiliki rekam jejak panjang dalam reformasi hukum dan pemerintahan yang baik. Lulusan Universitas Indonesia dan Osgoode Hall Law School, Kanada, Otta pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK pada 2009, serta aktif dalam berbagai forum reformasi hukum nasional dan internasional.

Dia juga pernah menjabat di UNDP dan Partnership for Governance Reform in Indonesia. Hoegeng Awards 2025 adalah tahun kedua keterlibatannya sebagai Dewan Pakar.

“Ajang ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Di tengah pemberitaan negatif, kita perlu menunjukkan bahwa masih ada sosok polisi yang patut diteladani,” kata Otta.

Gufron Mabruri

Sebagai Direktur Eksekutif Imparsial dan anggota Kompolnas 2024–2028, Gufron Mabruri telah lama berkecimpung dalam pemantauan dan penelitian hak asasi manusia serta reformasi sektor keamanan. Lulusan S-1 Syariah dan S-2 Human Rights Studies di Universitas Gadjah Mada ini juga aktif menulis buku dan menjadi pembicara di berbagai forum nasional.

Gufron menegaskan bahwa mekanisme Hoegeng Awards 2025 berlangsung secara objektif dan transparan.

"Tidak ada intervensi atau pesanan dalam pemilihan kandidat. Prosesnya murni untuk menemukan sosok polisi yang betul-betul mengabdi kepada publik," tegasnya.



Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.

Sebagai Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman memiliki peran penting dalam pengawasan lembaga penegak hukum, termasuk Polri. Aktivis sejak masa reformasi 1998 ini menyelesaikan pendidikan S1 Hukum di Universitas Lampung, lalu meraih gelar S2 di Universitas Indonesia dan S3 di Universitas Surakarta.

Di luar parlemen, Habib pernah memimpin Tim Advokasi Jakarta Baru dan mendirikan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Karier politiknya membawanya terpilih sebagai anggota DPR sejak 2019, di mana ia kini memimpin Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.

Kehadiran para tokoh dari beragam latar belakang ini memastikan bahwa proses seleksi Hoegeng Awards 2025 tidak sekadar formalitas penghargaan. Mereka adalah penjaga gerbang moral, yang mengawal agar pemilihan polisi teladan dilakukan secara jujur, transparan, dan bermakna.

Dengan figur-figur berintegritas ini di balik layar, Hoegeng Awards diharapkan terus menjadi simbol harapan bagi masyarakat bahwa di tengah tantangan yang dihadapi Polri, masih ada sosok-sosok polisi yang bekerja dengan hati, mengabdi demi keadilan, dan layak dijadikan teladan. [*]

Ngariung Iman Ngariung Aman: Cara Kapolres Serang Mengubah Stigma

Pendekatan yang dilakukan Kapolres Serang tak sekadar ceramah, tapi solusi dan hal itulah yang membuat warga antusias.



Di sebuah malam lengang di Kabupaten Serang, seorang pria muncul di pos ronda desa. Tidak dengan rompi anti huru-hara atau sirene mobil dinas. Ia datang dengan obrolan ringan dan candaan hangat dengan warga.

Pria itu adalah Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Condro Sasongko, Kapolres Kabupaten Serang, yang belakangan menjadi buah bibir karena pendekatannya yang tak biasa: Ngariung Iman, Ngariung Aman.

Ngariung—bahasa Sunda yang berarti berkumpul—menjadi jargon sekaligus metode kerja baru yang dikenalkan oleh AKBP

Condro Sasongko sejak menjabat sebagai Kapolres Serang awal 2024 lalu. Bukan sekadar pendekatan simbolik, program yang ia beri nama lengkap “Ngariung Iman, Ngariung Aman” itu telah mengubah wajah hubungan polisi dan masyarakat di wilayah hukumnya. “Kami nggak banyak ngomong. Biar warga yang cerita. Yang paling kritis malah kami kasih hadiah,” kata Condro sembari tertawa.

Namun di balik candanya, pendekatan itu serius. Ia berhasil menurunkan angka kejahatan lebih dari setengah hanya dalam sembilan bulan.

Mengubah Mindset

Ustadz Supriyatna dari Majelis Taklim Darul Kolot di Cikande menyebut Condro sebagai “sosok perubahan dalam kepolisian”. Ia menyaksikan sendiri bagaimana gaya jenaka dan kesederhanaan Condro membuat masyarakat tak lagi canggung menyampaikan masalah.

“Dulu, warga kami cenderung apatis atau bahkan takut berurusan dengan polisi. Sekarang? Mereka malah menunggu-nunggu giliran *ngariung*,” kata Supriyatna.

Pendekatan Condro memang tidak konvensional. Ia tak sekadar membacakan pesan-pesan kamtipmas. Ia menyerap, mendengarkan, dan menanggapi keluhan warga secara langsung. Beberapa yang paling vokal bahkan pulang membawa hadiah: setrika, kipas angin, atau bantuan sosial bagi warga yang kesulitan ekonomi. “Warga Serang bukan sekadar diberi ceramah, tapi diberi solusi. Itu yang membuat warga antusias,” kata Supriyatna.

Dari laporan kehilangan dompet hingga persoalan sosial seperti rumah tak layak huni, Condro tak ragu turun tangan langsung. “Hari itu juga langsung datang, bantu. Rumah yang saya laporkan sekarang sudah diperbaiki,” katanya.

Data pun berbicara. Pada Januari–September 2023, ada 245 tindak pidana dengan 106 penyelesaian kasus. Pada periode yang sama tahun berikutnya, kasus turun menjadi 112 dan penyelesaian melonjak jadi 120. Angka kejahatan turun 54,28 persen. Penyelesaian naik 6,6 persen.





Sebagai Medan Sosial

Di mata Condro, *ngariung* bukan proyek citra. Ia memulainya sejak hari pertama menjabat pada Januari 2024. Targetnya ambisius: dua desa dikunjungi setiap hari, terutama yang tengah menghadapi masalah. Bila kegiatan kantor padat, ia menyelinap ke desa saat jam tidur orang kota.

"Kalau semua sibuk siang hari, saya datang malam-malam, yang penting warga tahu saya niat ketemu mereka," katanya. "Saya ingin memberi contoh ke jajaran bahwa komunikasi dua arah adalah kekuatan polisi hari ini."

Tiap malam *ngariung*, Condro mendengar langsung soal jalan rusak, listrik mati, atau masalah remaja. Semua keluhan diurai, dan jika perlu, ia menelepon *stakeholders* malam itu juga. "Kalau warga mengeluh jalan gelap, kami hubungi pabrik lampu. CSR mereka kami minta untuk turun langsung. Kami harus paksa perusahaan peduli."

Tak berhenti pada program seremonial, Condro juga menetapkan target kuantitatif: setiap hari, Polres harus menyelesaikan dua masalah, Polsek satu. Ia pun memastikan laporan dari bawahannya tak asal 'asal bapak senang'. "Saya cek, tanyakan masalahnya apa, siapa yang bantu, penyelesaiannya seperti apa."

Ritme kerja semacam itu membuat urusan warga, dari kriminalitas ringan hingga permasalahan sosial, tersentuh langsung.

Memberantas Calo

Di tengah tingginya tingkat pengangguran di Banten, Condro menyoroti satu akar masalah: percaloan tenaga kerja. Ia menyebut praktik ini menutup akses warga lokal untuk bekerja di pabrik-pabrik sekitar karena hanya yang mampu membayar calo yang bisa masuk.

Solusinya: pemetaan warga pengangguran, koneksi langsung ke perusahaan, dan penghapusan

praktik perantara. Hasilnya, 123 warga dari 10 desa kini bekerja di dua perusahaan besar—PT Nikomas Gemilang dan PT Lami Packaging Indonesia. Desa Tambak, misalnya, mengirim 27 warganya untuk bekerja di pabrik sepatu ternama. "Kami potong sekat-sekat itu. Warga yang mau kerja kami jembatani langsung. Tanpa bayar, tanpa calo," kata Condro.

Warung Bhabin

Revolusi kecil lainnya dilakukan Condro di lini terdepan: bhabinkamtibmas. Ia merotasi sembilan bhabin yang dianggap tak menjalankan tugas maksimal. "Bhabin itu ujung tombak. Kalau malas, kami ganti. Ini bukan kerja sembarangan."

Inovasi dilanjutkan dengan mendirikan Warung Bhabin—tempat *ngariung* tetap yang disepakati dengan pemerintah desa. Di warung ini, bhabinkamtibmas bisa bertemu warga, menyuplai sembako murah hasil kerja sama dengan Bulog, dan menjadi simpul komunikasi keamanan lingkungan.





"Kalau bhabin lagi sakit atau lelah, mereka tak perlu keliling. Warga yang mendatangi Warung Bhabin. Jadi komunikasi tetap terjaga, tanpa memberatkan petugas," jelas Condro.

Bagi Condro, kunci keamanan bukan di kantor polisi, tapi di desa. Lewat Warung Bhabin, warga bisa datang melapor, bertanya, atau sekadar ngopi bareng bhabin. "Kami kerja sama dengan kepala desa dan Bulog. Sembako murah kami suplai ke warung itu, dan pemilik bayarnya nanti kalau sudah laku."

Warung Bhabin tidak hanya berfungsi sebagai tempat kumpul warga. Ia menjadi simpul komunitas: dari situ lahir laporan warga soal jalan rusak, lampu mati, pengangguran, hingga narkoba.

Kerja Serius

Di balik candaan dan pendekatan informal Condro, terlihat desain strategis yang menjadikan kepolisian sebagai institusi sosial. Ia mengubah peran polisi dari sekadar penegak hukum menjadi fasilitator, pendengar, dan problem solver di tengah masyarakat.

Dari ujung poskamling hingga ruang pertemuan pabrik, Condro dan program Ngariung Iman, Ngariung Aman menghadirkan wajah kepolisian yang humanis dan fungsional. Ia tak banyak berbicara soal reformasi, tapi langkah-langkahnya telah menghidupkan semangat perubahan di jalan-jalan desa Kabupaten Serang.

Ketika ditanya bagaimana mempertahankan semangat ini

di tengah tugas berat sebagai Kapolres, Condro hanya tersenyum. "Yang penting satu hari dua masalah selesai. Kalau belum selesai, jangan tidur dulu."

Condro menjadikan *ngariung* bukan sekadar silaturahmi, melainkan alat pemetaan masalah. Ia mencatat lima isu utama: kenakalan remaja, tawuran pelajar, narkoba, geng motor, dan pengangguran.

Setiap isu punya pendekatan spesifik. Remaja direkatkan lewat kegiatan positif. Narkoba diredam lewat razia dan edukasi. Pengangguran dihubungkan ke pabrik. Semuanya dimulai dari duduk bersama warga. [*]

MEMBERANTAS PREMANISME

untuk Menjaga Iklim Investasi

Operasi ini menasarkan berbagai bentuk tindakan premanisme seperti pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, penggeroyakan, hingga penganiayaan.



Premanisme kembali menjadi sorotan nasional menyusul pelaksanaan operasi besar-besaran yang digelar Polri sebagai respon meningkatnya praktik premanisme yang meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan serta iklim investasi di Indonesia.

Operasi yang digelar serentak sejak 1 Mei 2025 tersebut menasarkan berbagai bentuk tindakan premanisme seperti pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, penggeroyakan, hingga penganiayaan.

Sasaran utama operasi adalah individu atau kelompok yang melakukan aksi premanisme di lingkungan masyarakat maupun dunia usaha

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa instruksi pelaksanaan operasi tertuang dalam surat telegram bernomor

STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang dikirimkan ke seluruh jajaran polda dan polres di Indonesia.

"Operasi ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Penindakan dilakukan melalui pendekatan hukum, intelijen, serta langkah preemptif dan preventif," ujar Trunoyudo dalam keterangan pers, Selasa 6 Mei 2025.

Operasi ini menasarkan berbagai bentuk tindakan premanisme seperti pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, penggeroyakan, hingga penganiayaan. Sasaran utama adalah individu atau kelompok yang melakukan aksi premanisme di lingkungan masyarakat maupun dunia usaha.

"Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban dan iklim usaha akan kami tindak tegas.

Ini bagian dari upaya memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha," tegas Trunoyudo.

Menjamin efektivitas pelaksanaan operasi, Polri mengandeng TNI, pemerintah daerah, dan sejumlah pemangku kepentingan lain. Kolaborasi lintas sektor ini dianggap penting guna menciptakan dampak jangka panjang dan mencegah kemunculan kembali jaringan premanisme.

Laporan Kompas menyebutkan bahwa premanisme yang beroperasi secara terstruktur ditemukan di beberapa wilayah Jawa Barat dan Banten, khususnya di sektor industri. Modus mereka mencakup pengiriman surat rekomendasi, permintaan audiensi, hingga demonstrasi dengan pengerahan massa yang mengepung area pabrik.

Tekanan semacam ini membuat pelaku usaha sulit menjalankan bisnis

secara independen dan profesional. Tidak sedikit terjadi konflik ketika tuntutan para pelaku premanisme tidak dipenuhi.

Berdasarkan operasi serentak yang dilakukan sejak awal Mei itu, Polri berhasil menyelesaikan 3.326 kasus premanisme melalui operasi serentak yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Operasi ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk menjamin keamanan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dari ribuan kasus yang ditangani, Polri mengamankan ribuan pelaku yang terlibat dalam berbagai aksi premanisme, termasuk pemerasan, pungutan liar, dan intimidasi terhadap pelaku usaha.

Operasi ini juga melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk memastikan keberlanjutan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Anti Premanisme Dunia Usaha

Sementara itu, pemerintah tengah menyusun pembentukan tim khusus untuk memberantas praktik premanisme yang kerap mengganggu dunia usaha dan menghambat iklim investasi di Indonesia. Langkah ini



diambil guna menciptakan lingkungan berusaha yang lebih aman dan kondusif.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, tim ini akan fokus menangani premanisme secara sistematis dan berkelanjutan.

"Kami sedang menyusun tim khusus untuk menangani masalah premanisme. Ini tidak bisa diselesaikan instan karena perlu pendekatan jangka panjang," ujar Hasan dalam diskusi publik bertema "Bagaimana Visi Kesehatan Era Prabowo?" di Jakarta, Sabtu 17 Mei 2025.

Menurutnya, aksi premanisme menjadi salah satu penyebab investor ragu mananamkan modal di tanah air. Banyak pelaku usaha mengeluhkan pungutan liar dan intimidasi yang menambah biaya operasional secara ilegal. "Jika ini bisa diberantas, iklim usaha akan lebih sehat dan terbuka peluang lapangan kerja baru," kata Hasan.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan menggeneralisasi organisasi masyarakat (ormas) dalam penindakan. "Kami tidak menyamaratakan semua ormas. Target kami adalah praktik premanisme, bukan organisasinya. NU,

Muhammadiyah, IDI, itu semua ormas baik," tegasnya.

Langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun ekosistem bisnis yang adil, aman, dan berkelanjutan. Selain penegakan hukum, pemerintah juga menyiapkan program pembinaan agar mantan pelaku premanisme bisa diarahkan ke sektor produktif. "Solusi jangka panjangnya adalah memberi peluang agar mereka bisa bekerja dan tidak kembali pada praktik lama," kata dia.

Langkah serentak Polri yang menuntaskan ribuan kasus menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi ancaman terhadap dunia usaha. Namun, perjuangan belum selesai.

Diperlukan pendekatan sistematis dan lintas sektor agar premanisme benar-benar enyah dari ekosistem bisnis Indonesia. Dengan dukungan masyarakat, dunia usaha, dan komitmen pemerintah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menutup pintu rapat-rapat bagi intimidasi dan membuka lebar-lebar jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkeadilan. [*]

PREMAN, dari Penantang Kolonial Menjadi Pengisap Darah Rakyat

Di awal kemunculannya, istilah preman tak berkonotasi negatif dan justru menggambarkan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendefinisikan kata preman sebagai sebutan kepada orang jahat. Mereka disandingkan dengan penodong, perampok, pemeras dan sebagainya. Dengan kata lain preman merupakan sebutan untuk orang-orang yang memalak, penjahat kecil, hingga berandalan.

Sementara berdasar etimologi preman berakar pada bahasa Belanda yakni *vrijman* yang menjelaskan “orang bebas” atau “orang yang tidak terikat” merujuk mereka yang tidak bekerja kepada pemerintah kolonial.

Di awal kemunculannya, istilah ini tidak memiliki kontasi negatif dan sebaliknya justru

menyatakan sosok yang memiliki semangat perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan.



Di kawasan perkebunan Sumatera, seperti Medan, kelompok *vrijman* dikenal atas keberaniannya melawan penindasan para pengusaha kolonial. Mereka dihormati karena keberanian dan kekuatan fisik yang dimiliki.

Sementara itu di Jawa, mereka dikenal sebagai jago atau jawara yang biasanya merupakan tokoh lokal yang tak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki peran sosial penting sebagai pelindung atau penengah konflik di tengah masyarakat.

Peran mereka makin menonjol dengan keterlibatan mereka dalam perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Salah satu contohnya adalah keterlibatan mereka dalam pemberontakan petani Banten pada tahun 1888.

Ian Douglas Wilson seorang peneliti dari Murdoch University, Australia dalam bukunya Politik Jatah Preman: Ormas

dan Pasca Orde Baru menulis para jago ini sudah ada bahkan sejak era sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa.

Umumnya, mereka memiliki kemampuan fisik termasuk ilmu bela diri seperti pencak silat dan sejumlah kesaktian. Kemampuan itulah yang kemudian digunakan untuk melakukan penyerangan, merampok, sekaligus melindungi kelompoknya sendiri. Saat Belanda datang, posisi mereka tidak terganggu.

Bergeser Peran

Kedatangan dan perluasan berangsur kolonial Belanda tidak mengganggu keberadaan para jago ini. Baru di abad ke-19, seiring dengan menguatnya pemerintahan secara birokratis, peran mereka perlahaan-lahan mulai tergeser.

Dalam buku *Para Jago dan Kaum Revolusioner* karangan Robert

Cribb peneliti Australian National University, para jago ini bisa bekerja sendiri-sendiri, bersama-sama, atau mengikuti majikannya. Mereka juga menerima order dari para juragan untuk mengkoordinir buruh atau memimpin kelompok perampok.

Di Batavia, dengan jaringan yang berdiri di luar hierarki otoritas mereka menjadi bagian dunia kriminal dan kerap disewa para pedagang Arab atau China untuk menghancurkan pesaingnya.

Cribb juga menulis seiring waktu kelompok ini juga terhubung dengan kelompok pergerakan nasional dan berbagi kebencian yang sama terhadap pemerintah kolonial. Ikatan ini sempat renggang menyusul kegagalan pemberontakan PKI terhadap Belanda di Batavia pada 1926.

Pada masa akhir pendudukan Jepang, hubungan kelompok ini kembali menguat yang berwujud pada aliansi revolusioner antara dunia hitam Jakarta dengan sayap kiri gerakan nasionalis Indonesia. "Para bandit memiliki basis organisasi yang dapat dimanfaatkan kaum nasionalis untuk pengerahan massa," tulis Cribb.

Menyusul Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia memiliki pekerjaan besar menyatukan para jago dan laskar pejuang kemerdekaan. Beberapa dari mereka menjadi bagian tentara nasional. Sementara beberapa yang lain, pulang ke kampung atau membentuk organisasinya sendiri termasuk di antaranya Imam Sjafe'i, atau Bang Pi'i, mantan bos preman di Pasar Senen.

Pi'i menjadi salah satu jago yang terimbas perampungan militer dalam program Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera) dan membentuk geng Korps Bambu Runcing (Kobra) pada 1949. Kobra menjadi organisasi masyarakat semi militer pertama yang dibentuk setelah kemerdekaan.

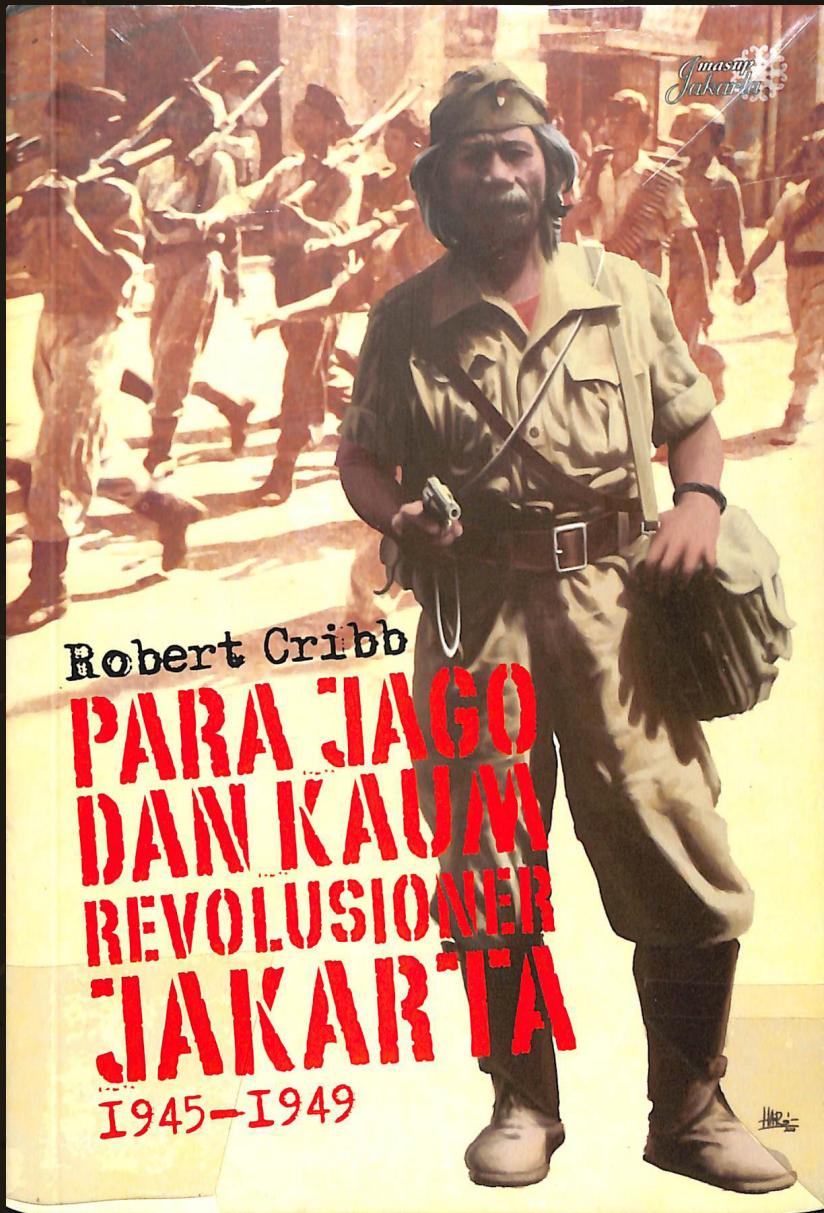
Militer yang melihat potensi para jago ini perlahan-lahan merekrut mereka dalam kerja sama baru yang menggabungkan elemen militer, para jago, bekas laskar, pemuda, hingga dunia kriminal.

Transformasi radikal baru terjadi di era Orde Baru ketika pemerintahan yang otoriter menggunakan kelompok preman sebagai alat informal untuk menjaga ketertiban dan menekan kelompok oposisi.

Pada masa ini, preman semakin terlembagakan dan menjadi kepanjangan tangan panjang negara termasuk untuk mengutip uang dan keuntungan dari sektor informal. Para preman beroperasi sembari mengumbar omong kosong tentang ideologi negara dan membuat perkumpulan-perkumpulan yang berwatak nasionalis. Di sisi lain mereka sangat bergantung pada sosok dari pemerintahan yang menjadi beking. Mereka yang tidak memiliki beking bakal rentan diincar jerat hukum.

Pada periode ini Orde Baru juga meluncurkan Operasi Penembakan Misterius (Petrus) pada awal 1980-an yang menyasar banyak preman dan pelaku kriminal dengan korban ribuan orang. Secara tidak langsung





operasi ini mengajarkan para preman bahwa meskipun secara lokal mereka bisa sangat berkuasa, mereka dengan gampang bisa disingkirkan.

Di masa inilah preman berbondong-bondong bergabung dengan organisasi resmi kemasyarakatan. Bisa disimpulkan, kunci bertahan hidup para preman adalah berorganisasi dan pernyataan kesetiaan penuh penguasa.

Setelah jatuhnya Orde Baru di tahun 1998, premanisme tak serta merta menghilang. Mereka juga diserap masuk ke dalam organisasi masyarakat (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM), hingga partai politik dengan memanfaatkan kekuatan informal yang dibangun sebelumnya untuk memperoleh legitimasi. Peran mereka juga bergeser menjadi penyedia jasa keamanan, pengelola parkir liar, dan penguasa wilayah tertentu.

Shadow State

Di sisi lain, organisasi preman lambat laun berkembang menjadi berkedok gerakan sosial ataupun gerakan keagamaan. Perubahan wajah tersebut organisasi itu tak lagi sepenuhnya dapat dikatakan organisasi preman. Namun juga tak bisa dilepaskan dari sebutan

Meski umumnya *shadow state* lahir pada situasi negara rapuh, beberapa studi lain seperti yang dilakukan John Sidle justru menemukan premanisme di Indonesia lahir saat negara kuat.

organisasi preman karena praktik-praktiknya yang masih menggunakan cara kekerasan.

Pada berbagai kesempatan mereka menjalin persekutuan dengan elite dan partai politik agar pengaruh mereka semakin kuat. Bahkan, pada beberapa kasus, agar mendapatkan posisi struktural dalam pemerintah.

Sementara itu, karena bekerja di luar mekanisme formal, premanisme memiliki peran yang tidak bisa diremehkan. Banyak keputusan publik ditentukan persetujuan 'bawah tanah' premanisme. Banyak kalangan menyebut mereka sebagai kelompok bayangan dari institusi formal dan menjadi *shadow state* dan ini bukan fenomena baru.

Meski umumnya *shadow state* lahir pada situasi negara rapuh, beberapa studi lain seperti yang dilakukan John Sidle justru menemukan premanisme di Indonesia lahir saat negara kuat.

Tumbuhnya sektor ekonomi informal tanpa kemampuan memadai negara melayani kebutuhan rakyat adalah pemicu munculnya *shadow state*.

Tidak bisa dielakkan bahwa ada hubungan yang jelas dan tidak terpisahkan antara premanisme, ekonomi informal, dan *shadow state*. Akar dari ini semua dapat ditunjuk pada sebuah fenomena klasik: kemiskinan yang mendorong orang lari ke perkotaan mencari penghidupan lebih baik.

Di sisi lain, perkotaan membuat orang-orang yang berasal dari daerah asal sama, bekerjasama membentuk jaringan untuk bertahan hidup. Basis kedaerahan dan etnis dinilai sebagai basis yang paling bisa dipercaya untuk menghadapi kota yang kejam. Tidak hanya mempengaruhi ekonomi informal, kuatnya pengaruh mereka terhadap institusi formal membuat banyak orang menyebut preman sebagai bagian dari *shadow state*. [*]

Percepat MBG, Kapolri Tinjau Operasional SPPG di Sulsel

SPPG Polri merupakan dapur umum yang menjadi pusat produksi makanan bergizi yang dibangun untuk mendukung program MBG.



Mendukung program unggulan pemerintah berupa Makan Bergizi Gratis (MBG), Polri memperbaik pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri untuk menyediakan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah.

Mengaksesi dukungan Korps Bhayangkara tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau SPPG Polri milik

Polda Sulawesi Selatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 15 Mei 2025.

Pada kesempatan tersebut, Kapolri mengecek langsung kesiapan operasional SPPG Polda Sulsel mulai dari tempat pencucian, kemudian penyimpanan, tempat memasak, hingga packing dan persiapan didistribusi.

"Saya selalu pesankan lakukan evaluasi, termasuk tadi kita cek, sebelum ada distribusi disiapkan

food security, karena itu penting dan tentunya lakukan terus perbaikan sehingga kemudian SPPG yang ini betul-betul bisa maksimal," kata Kapolri.

Menurut Jenderal Listyo Sigit, evaluasi penting dilakukan agar para siswa penerima program MBG dapat betul-betul merasakan manfaatnya. Dijelaskan juga SPPG tersebut akan bertugas menyediakan makan bergizi bagi 3.376 siswa dari 16 sekolah yang ada di sekitar lokasi.

"Sehingga betul-betul bisa menjadi SDM yang unggul untuk mengisi kesiapan kita menuju Indonesia Maju, mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045," kata Kapolri.

Dalam kunjungan tersebut juga disalurkan sejumlah bantuan di antaranya alat chopper untuk Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) dan 50 paket sembako untuk petugas SPPG.

Selain menyediakan makanan bergizi dan distribusinya, SPPG juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung termasuk dibangun kolam budidaya ikan sebagai penunjang penyediaan makan bergizi gratis. Diharapkan kolam budidaya tersebut juga akan membantu pemenuhan lauk untuk program MBG bagi siswa.

"Tadi ada tambahan di samping SPPG akan disiapkan budidaya ikan. Saya kira ini bisa menjadi pelengkap kebutuhan, terkait dengan masalah lauk yang menjadi variasi yang dibutuhkan SPPG," kata Kapolri.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri melakukan tebar benih ikan di sejumlah kolam, yakni dua kolam tanah sebanyak 20 ribu ekor nila dan dua kolam karamba sebanyak 2.500 ekor nila.



Tambah SPPG

Dijelaskan lebih lanjut oleh Kapolri, bahwa saat ini jajarannya telah membangun 18 SPPG dan 39 SPPG lainnya sedang dalam proses pembentukan. Direncanakan hingga akhir tahun 2025, Polri membangun total 100 SPPG.

"Karena memang ada proses-proses verifikasi dan rencana sampai dengan akhir tahun kita akan membangun 100 SPPG. Harapan kita program yang kita laksanakan ini bisa mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak

Presiden berkaitan dengan program makan bergizi gratis," jelas Kapolri.

Seperti diketahui SPPG Polri merupakan dapur umum yang menjadi pusat produksi makanan bergizi yang dibangun untuk mendukung program MBG. Saat ini lokasi SPPG Polri di antaranya 4 SPPG berada di tingkat Mabes Polri, 16 SPPG Polri di tingkat Polda di 26 provinsi di Indonesia. SPPG Polri terbilang memiliki fasilitas lengkap seperti pada SPPG Polri di Pejaten, Jakarta Selatan yang memiliki fasilitas seperti ruang sortir dan

cuci bahan makanan, gudang buah dan sayur, serta gudang bahan makanan kering dan basah.

Pada beberapa SPPG juga dikembangkan kebun sayuran hidroponik untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pembangunan SPPG juga melibatkan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta Polri menambah jumlah SPPG hingga



1.000 unit untuk mempercepat target program MBG.

"Kami sangat senang karena Polri sudah merencanakan pembangunan 542 SPPG. Saya tadi berbisik kepada Pak Kapolri, mudah-mudahan bisa mencapai 1.000 SPPG," kata Dadan, Senin 17 Maret 2025.

Menurutnya, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan nasional, namun dengan komitmen dan kerja cepat Polri, ia optimis percepatan program MBG bisa segera terealisasi.

"Bahkan dengan 1.000 SPPG, itu baru 3 persen dari kebutuhan nasional. Tapi saya optimis, dengan langkah serius dari gugus tugas Polri, pada bulan September seluruh fasilitas yang diperlukan untuk percepatan bisa tersedia," kata dia.

Dadan menambahkan, pertumbuhan SPPG dalam beberapa waktu terakhir sangat signifikan, dengan Polri menjadi salah satu penyumbang utama. "Belum lama kita MoU, hari ini kita sudah launching 4 SPPG

baru, ditambah 16 lainnya sebagai bagian dari percepatan program ini. Minggu lalu jumlahnya masih 726, sekarang bertambah sekitar 300 SPPG, dan sebagian besar ada di Polri," kata dia.

Polri Kunci Percepatan

Kepala BGN juga menegaskan bahwa keterlibatan Polri menjadi kunci percepatan MBG, sejalan dengan tiga faktor utama kesuksesan program, yaitu anggaran, yang sudah disiapkan oleh Presiden. Lalu, sumber daya manusia yang telah dilatih dan akan terus ditambah, serta infrastruktur yang saat ini sedang dikembangkan dengan mengandeng berbagai instansi, termasuk Polri.

Lebih lanjut Dadan memastikan bahwa SPPG Polri telah memenuhi empat standar utama dalam penyediaan makanan bergizi, di antaranya pemenuhan kebutuhan kalori sesuai standar kesehatan, komposisi gizi yang seimbang, aspek higienis dalam pengolahan makanan, dan keamanan pangan, dengan pengecekan sebelum distribusi.

"Di SPPG Polri ini, keempat standar tersebut sudah terpenuhi. Sebelum makanan dikirim, sudah dicek oleh para ahli, sehingga terjamin aman dan berkualitas tinggi," kata dia.

Seperti diketahui Polri mendukung penuh dan *all out* program MBG termasuk di antaranya dengan pembangunan dan operasi SPPG, melakukan rekrutmen Bakomsus dengan keahlian bidang pangan dan gizi, kolaborasi dengan Universitas Pertahanan untuk pelatihan SDM, pengawasan pangan dan dukungan infrastruktur seperti menyiapkan kebun hidroponik untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pangan. [*]



Awaloedin Djamin

PUNGGAWA BHAYANGKARA DENGAN 1001 BAKAT

Menggambarkan latar belakang pegunungan yang elok, film Darah dan Doa atau *The Long March* dibuka dengan narator yang menjelaskan tentang kisah perjalananan sepasukan Tentara Nasional Indonesia sekaligus kisah seorang manusia di masa-masa revolusi. Tentang dua teman seperjuangan yakni Sudarto dan Adam yang sama-sama perwira. Satu menjabat komandan batalyon, sedangnya satunya lagi adalah kepala staf.

Menjadi film pertama yang secara resmi diproduksi oleh Indonesia yang berdaulat, dalam dunia sinematografi Darah dan Doa adalah tonggak terpenting dunia perfilman tanah air. Bahkan, saat film itu memulai hari pertama syuting pemerintah menetapkannya sebagai Hari Film Nasional melalui Kepres Nomor 25 tahun 1999.

Dikomandoi oleh Usmar Ismail sebagai sutradara, Darah dan Doa menceritakan kisah long march Divisi Siliwangi dari pangkalannya di Jawa Barat ke Yogyakarta dengan racikan romantisme masa revolusi.

Dalam film ini, Usmar Ismail menggunakan pendekatan unik dengan tak menggunakan aktor-aktor profesional. Inilah yang menjadi muasal pendekatan gaya-gaya neo realisme yang tenar di masa itu pada film-film Italia.

“Usmar Ismail mengambil orang-orang jalanan untuk jadi pemain dalam filmnya. Seperti Del Yuzar, Awal, Aedy Moward,” kata Rosihan Anwar saat menulis pada Pengantar pada Pertunjukkan Filem Retrospektif Usmar Ismail. Lalu, siapa nama Awal yang disebut Rosihan Anwar itu?

Ia memfokuskan pemikiran dan kerjanya dengan pemberian menyeluruh yang disebutnya sebagai overall reform untuk meningkatkan citra dan wibawa Polri.





Tentu tak ada yang bakalan menduga, kalau si Awal itu di belakang hari oleh Presiden Soeharto ditunjuk sebagai orang nomor satu di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Benar, ia adalah Awaloeddin Djamin, putra Minang yang lahir di Padang, Sumatera Barat pada 26 September 1927.

Meski sempat menjadi pemeran dalam layar lebar, jangan kira bintang-bintang yang disandang di bahunya jatuh tiba-tiba dari langit. Awaloeddin Djamin bahkan meniti karirnya di Korps Bhayangkari benar-benar mulai dari bawah yakni sebagai Komisaris Polisi Tingkat I, Jawatan Kepolisian Negara, Jakarta tahun 1955.

Perang Gerilya

Sebelum sempat terjun di dunia film, pada masa revolusi fisik Awaloeddin terdaftar sebagai anggota

Tentara Pelajar (TP). Pasukan inilah yang malang melintang mengganggu Belanda di kawasan Koto Tinggi dan sekitarnya. Ia juga ikut bergerilya bersama Pemerintah Darurat RI (PDRI) setelah Belanda menduduki Yogyakarta. Mengenang masa-masa itu, seperti dikatakannya sendiri Awaloeddin memilih untuk merendah, "Saya apalah waktu itu, masih ingusan."

Masa kecilnya dan sekolah dari sekolah dasar hingga menengah atas dilaluinya di kota Padang, Sumatera Barat. Awaloedin adalah sosok yang memiliki cukup kelebihan. Selain sebagai polisi yang piawai, ia juga adalah politisi yang handal dan akademisi yang brilian. Ia lahir dari keluarga bangsawan. Selesai pendidikan setingkat SMA di



Padang, Awaloedin melanjutkan ke Universitas Indonesia, Jakarta, 1949-1950.

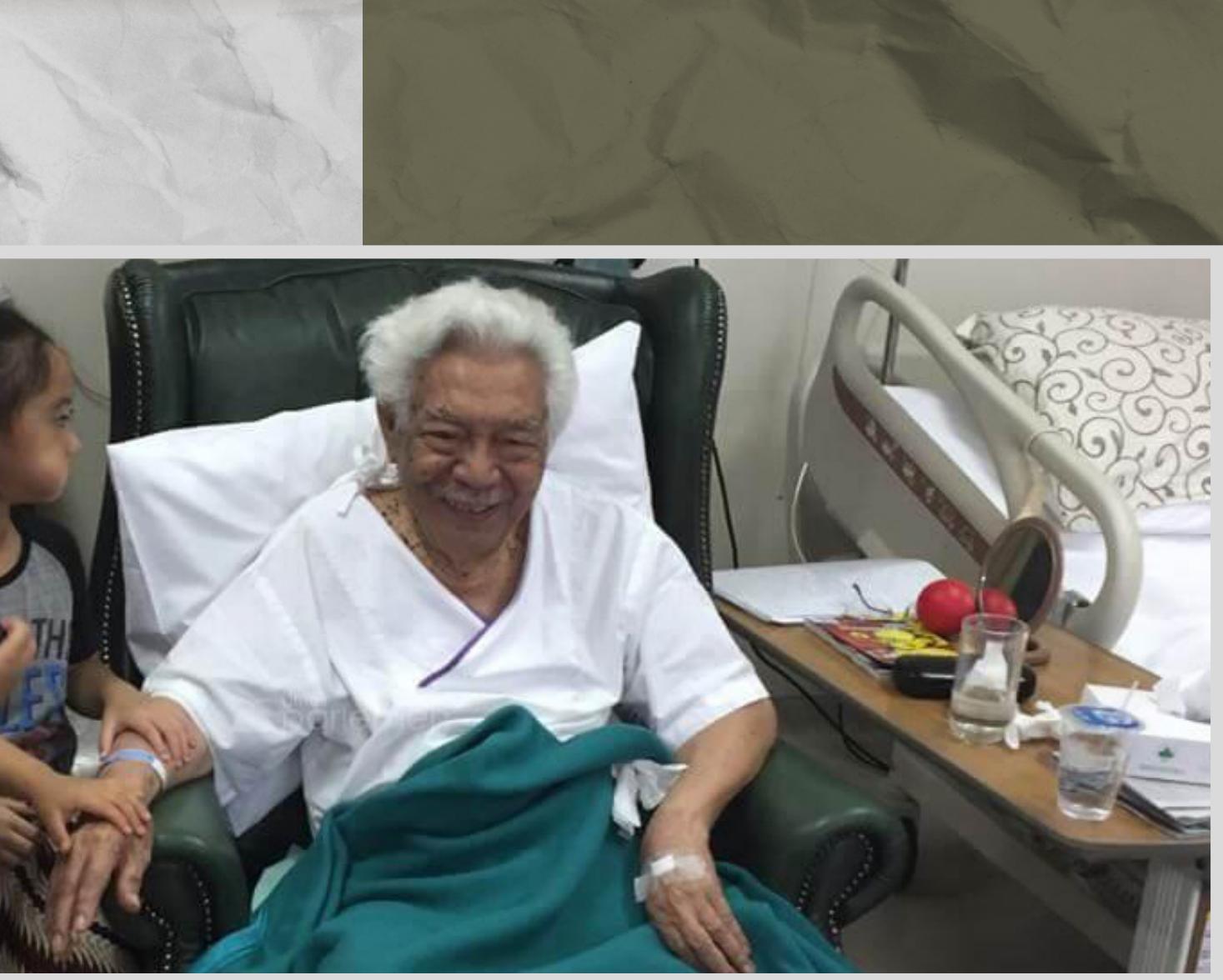
Awaloedding menikah di usia ke-30 dengan meminang sosok wanita keturunan Jawa bernama Poppy Marleny Djuanda pada 28 Oktober 1957. Poppy tentu bukan gadis sembarangan. Ia adalah putri Perdana Menteri terakhir dan terlama di Indonesia yaitu Ir. Djuanda. Ia menikahi wanita pujaannya saat baru dua tahun lulus program Doktorandus di Perguruan tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Saat pernikahan, Presiden Soekarno bahkan turut hadir sebagai saksi.

Di antara karya tulis Awaloedin baik sebagai Guru Besar FISIP UI maupun sebagai perwira senior Polri dan dosen PTIK sampai saat ini masih menjadi sumber rujukan dalam ilmu administrasi negara dan ilmu kepolisian di Tanah Air.

Beberapa hal penting sudah menjadi perhatiannya pada dekade 90-an seperti tertulis pada biografinya yang berjudul Pengalaman Seorang Perwira Polisi di antaranya pelaksanaan *human right*, meningkatnya *international crime*, terorisme termasuk *skyjacking* sebagai senjata politik baru, bencana alam dan bencana buatan manusia, resesi ekonomi, pencemaran lingkungan, gerakan liberalisasi, demokratisasi, dan lain-lain.

Saat menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja pertama tahun 1966, setelah perubahan dari Departemen Perburuhan dan menjadi Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 1971 – 1976, Awaloedin melahirkan sejumlah kebijakan strategis dan visioner, termasuk meletakkan dasar-dasar penyempurnaan administrasi dan aparatur pemerintah yang sekarang dikenal sebagai Reformasi Birokrasi.





Selaku Menteri Tenaga Kerja, Awal menghadapi situasi negara yang rumit dan berat pasca pengkhianatan G30S/PKI tahun 1965. Problematika ketanagakerjaan satu per satu dipelajari dan diurai benang kusutnya termasuk dengan meletakkan dasar-dasar hubungan perburuhan sesuai dengan Pancasila yang secara fundamental berbeda dari hubungan perburuhan liberal di negara-negara Barat.

Ketika akhirnya dipercaya mengemban jabatan puncak jajajaran Bhayangkara tahun 1978-1982, Awaloeddin telah melewati berbagai tugas dan jabatan tak hanya di lingkungan kepolisian.

Selain pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja, dan anggota DPR, Awaloeddin juga sempat ditunjuk oleh Presiden Soeharto menjabat Duta Besar untuk Jerman Barat periode tahun 1976-1978.

Jejak rekam jabatannya yang beragam itulah yang belakangan memancing Jenderal M Jusuf yang kala itu menjadi Menhankam berseloroh ketika melihat

Awaloeddin sibuk mempersiapkan diri dan latihan baris-berbaris untuk pelantikan. "Bagaimana, sudah pintar baris-berbaris?"
Pembenahan

Saat akhirnya dilantik sebagai Kapolri pada 26 September 1978, institusi kepolisian tengah dirundung berbagai masalah terutama terkait citra yang kurang menggembirakan di masyarakat.

Mempelajari situasi dengan saksama, Awaloeddin segera memutuskan berbagai kebijaksanaan dalam pembenahan Polri. Ribuan anggota Polri yang ketahuan melakukan pelanggaran ditindak tegas.

• Ia juga merancang sistem keamanan lingkungan yang mengikutsertakan masyarakat untuk menjaga keamanan yang dirumuskan dengan Siskamling. Metode itu terbukti manjur meredakan kejahatan di lingkungan pemukiman.

Awaloeddin juga memfokuskan pemikiran dan kerjanya dengan pembenahan menyeluruh yang disebutnya sebagai overall reform untuk

meningkatkan citra dan wibawa Polri. Hal terpenting yang dilakukan Awaloeddin dikenal dengan kebijakan terpadu "Program Pemberian dan Peningkatan Citra Diri".

Bisa dibilang, Awaloedin Djamin adalah peletak dasar bagi organisasi kepolisian yang modern. Tiga kebijaksanaannya semasa menjabat sebagai Kapolri yang patut dicatat dalam sejarah yakni pemberian organisasi,

pendidikan kepolisian dan kerja sama luar negeri. Ketiga hal itulah yang sampai saat ini manfaatnya masih dirasakan Polri.

Tak hanya hanya menuangkan idealisme dan pemikirannya sebagai Kapolri, Awaloeddin juga menjadi polisi pertama yang meraih gelar doktor (PhD) dan diangkat menjadi profesor dalam ilmu administrasi negara di tahun 1963.

Awaloedin Djamin juga yang memprakarsai pembentukan satuan

pengaman (Satpam) di Indonesia. Kala itu, ia menyebut bahwa tugas kepolisian hanya berkisar 50 persen untuk menciptakan keamanan di masyarakat. Harus ada upaya pengamanan swakarsa, seperti sistem keamanan lingkungan untuk membantu tugas-tugas kepolisian.

Pada 30 Desember 1993 Kepolisian Negara RI mengukuhkan Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Drs. Awaloedin Djamin, M.P.A. sebagai Bapak Satpam Indonesia.





Dan tanggal tersebut hingga kini diperingati sebagai Hari Satpam Nasional atau HUT Satpam di Indonesia.

Selain mendapat gelar sebagai Bapak Satpam Indonesia, nama Awaloedin Djamin turut diabadikan menjadi nama sebuah Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Polda Jateng. Rumah sakit tersebut bernama RS. Bhayangkara Prof. Awaloedin Djamin Semarang.

Seperti tak pernah terpengaruh, di usia senjanya Awaluddin masih menyisakan waktu untuk

memperhatikan institusi yang telah membesarkan namanya. Ia kerap memberi masukan atau kritik, diminta atau tidak kepada para petinggi Polri.

Awaloedin Djamin meninggal dunia karena sakit di RS Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 31 Januari 2019 dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bertindak sebagai inspektur upacara. □





Aiptu Jimmi Farma: Menebar Pendidikan, Diganjar Sekolah Perwira

Aiptu Jimmi Farma telah menunjukkan bahwa dengan niat baik dan ketulusan, kita bisa memberikan dampak positif bagi orang lain.



Bagi warga masyarakat di Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau, Aiptu Jimmi Farma adalah sosok teladan. Tak hanya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif, ia juga menginspirasi lewat pendirian Pondok Tahsin Al-Qur'an Baitul Ihsan, sebuah lembaga pendidikan Al-Qur'an gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Dibangun di atas tanah tanah wakaf warga, pondok tersebut menampung lebih ratusan santri dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Pembelajaran tahsin dan tajwid di tempat tersebut dilakukan cuma-cuma tanpa dipungut biaya sedikit pun. Semua operasional dan proses belajar mengajar dijalankan dengan prinsip keikhlasan serta pelayanan sosial berbasis nilai keagamaan.

Mengampu tugas di bidang kehumasan, Jimmi sadar betul tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara tak sekadar menyampaikan informasi, namun juga membawa perubahan positif di tengah masyarakat.

Sikap keteladanan Jimmi yang menunjukkan sikap humanis dan peduli pendidikan membuktikan bahwa anggota Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan tetapi juga mampu menjadi agen perubahan sosial dan pendidikan di tengah masyarakat.

Melalui pengelolaan Pondok Tahsin Al-Qur'an itulah, Jimmi berusaha menebar nilai-nilai kebaikan sekaligus memperkuat citra Polri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.

Dedikasi luar biasa ini mendapat perhatian khusus dari Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo yang menganggap kiprah Jimmi Farma merupakan perwujudan nyata semangat Polri Presisi: melayani dengan humanis, mengayomi, dan menjadi agen perubahan di masyarakat.

Penghargaan tersebut disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Riau dan menyempatkan diri meninjau Polsek Rumbai Pesisir, Polresta Pekanbaru, Jumat 25 April 2025.

Pada kesempatan tersebut Kapolri tampak bertanya kepada Aiptu Jimmi seputar pesantren yang dikelolanya. Jimmi mengatakan, bangunan pesantren diwakafkan masyarakat yang kemudian





didirikan sekolah dan dikelola untuk membantu pendidikan warga yang kurang mampu.

Dalam perbincangan tersebut, Kapolri yang didampingi Gubernur Riau, Abdul Wahid, sempat menunjuk pangkat Jimmi yang masih Aiptu "Itu kenapa pangkatnya masih balok-balok dua. Kenapa, belum sekolah?" tanya Kapolri.

"Siap jeneral. Sudah ikut tes tapi enggak lulus, jeneral," jawab Jimmi. "Ya sudah, besok kamu lulus," kata Kapolri sambil memegang lengan Jimmi yang langsung menyalami Kapolri dan mengucapkan terima kasih.

"Aiptu Jimmi Farma telah menunjukkan bahwa dengan niat baik dan ketulusan, kita bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Semangat ini harus terus kita jaga dan kita tularkan kepada seluruh anggota Polri."

Kapolri menjelaskan kesempatan mengikuti sekolah perwira diberikan kepada Jimmi karena keteladanannya merupakan representasi nyata dari Polri yang presisi, humanis, dan peduli pendidikan. "Ini juga membuktikan, anggota Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan. Tetapi, juga mampu menjadi agen perubahan sosial dan pendidikan di tengah masyarakat," kata Kapolri.

"Aiptu Jimmi Farma telah menunjukkan bahwa dengan niat baik dan ketulusan, kita bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Semangat ini harus terus kita jaga dan kita tularkan kepada seluruh anggota Polri!"

Dukungan masyarakat terhadap Jimmi pun mengalir deras. Baik melalui media sosial, maupun kunjungan langsung ke Pondok Al Qur'an Baitul Ihsan. Banyak yang berharap, kisah inspiratif ini menjadi virus kebaikan yang menular ke seluruh pelosok Indonesia.

Pengajar Favorit

Aiptu Jimmi Farma, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kapolri. Ia berharap apa yang dilakukannya





dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan pendidikan.

“Ini adalah amanah dari Allah SWT. Saya hanya ingin membantu anak-anak yang kurang mampu agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” kata dia.

Kesempatan sekolah perwira tersebut memungkinkan Jimmi naik pangkat menjadi Inspektor Dua (Ipda) setelah tamat.

Muhammad Mahdi, salah seorang santri Pondok Tahsin Baitul Ihsan menceritakan dirinya mengaku bangga bisa berguru kepada Aiptu Jimmi. Menurutnya, pembelajaran Al-Qur'an yang diberikan sangat menyenangkan, mudah dipahami, dan penuh ketulusan.

Belajar di pondok tersebut sejak tahun 2021, Mahdi menambahkan, dirinya merasa banyak terbantu, khususnya dalam memahami ilmu tajwid.

“Di mana pondok ini begitu banyak sekali ilmu yang diajarkan oleh guru-guru.

Terutama dalam bidang Al-Qur'an. Dan cara mengajarnya pun juga menyenangkan dan tidak membosankan. Dan ilmu yang diajarkan itu sangat mudah dipahami dan diterapkan oleh setiap santri yang belajar di sana,” kata dia.

“Ini yang kami banggakan dari seorang Aiptu Jimmi Farma atau Ustaz Jimmi Farma. Akhiratnya dapat, dunia pun dapat. Beliau guru favorit kami,” kata Mahdi.

Sementara itu, santri lainnya, Handany Fariz juga menuturkan hal serupa. Ia menyebut bahwa keberadaan pondok ini sangat berarti, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi namun ingin belajar agama.

“Saya belajar Al-Qur'an dan beberapa hadis. Aiptu Jimmi Farma itu baik, memberikan kami pelajaran secara gratis. Saya berharap beliau bisa naik jadi perwira dan bahkan mendapatkan hadiah umrah,” cerita Fariz. [*]





Bripda Seri Santoso, Pengabdian untuk Anak-Anak Rimba

Ia mudah diterima oleh anak-anak di Suku Anak Dalam karena merupakan bagian dari kehidupan mereka.



Dari rimba mengabdi ke rimba sepertinya menjadi penggambaran yang paling tepat untuk kisah pengabdian Bripda Seri Santoso. Tak lupa akan asal-usulnya, ia mengabdikan diri membantu suku Anak Dalam di Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi.

Sebagai putra daerah, Bripda Seri merasa punya tanggung jawab untuk membantu dan mencerdaskan warga di tempatnya bertugas. Kebiasaanya menjelajah keluar masuk hutan mengajar baca, tulis, hitung untuk anak-anak suku

Anak Dalam membuatnya dijuluki sebagai Polisi Rimba. Julukan itu disematkan kepada dirinya karena dia merupakan warga asli Suku Anak Dalam.

Tak sembarang orang bisa diterima mengajar warga Suku Anak Dalam, namun karena dianggap merupakan bagian dari



mereka Bripda Seri Santoso mudah diterima dengan baik anak-anak setempat.

"Di balik Polisi Rimba ini kita dari putra asli daerah, orang rimba. Jadi kita dipanggil Polisi Rimba, karena kita mengayomi khususnya warga Suku Anak Dalam yang di rimba-rimba," kata Bripda Seri.

Bripda Seri biasa mengajar di sela atau setelah lepas tugas dan anak-anak selesai sekolah di sore hari. Memanfaatkan bangunan milik pemda setempat, sedikitnya sekitar 15 anak-anak yang ikut belajar calistung.

"Seminggu 3-4 kali, karena kan ini warga anak dalam ini ndak bisa kita paksakan, nanti kalau mereka waktunya mood mau belajar kita nanti dipanggil 'ayo Pak Seri kita belajar', baru kita ajar. Kalau kita paksakan mereka nanti

tidak mau, jadi kadang-kadang seminggu 4 kali, kadang-kadang 3 kali" jelasnya.

Dia mengaku seringnya sendiri ketika mengajar anak-anak Suku Anak Dalam tersebut. Namun, tak tak jarang ada juga Bhabinkamtibmas dan LSM yang sukarela membantu mendampinginya mengajar.

Ia juga bersyukur bahwa kegiatan sosialnya itu didukung dan dibantu sepenuhnya oleh Polres Bungo. Seperti alat-alat belajar seperti buku, pensil hingga papan tulis selalu dibelikan oleh Polres Bungo.

"Kalau yang membiayai untuk papan tulis sama-sama buku, pensil, pena dari Polres Bungo. Alhamdulillah kita dibantu oleh Polres Bungo untuk alat-alat belajar mereka," kata dia.





Bripda Seri Santoso juga dikenal karena responnya yang cepat dan solutif dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh Suku Anak Dalam, seperti saat mereka terserang ISPA. Ia juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan dan hal-hal penting lainnya.

"Kebanggaan bagi saya menjadi bagian dari keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana dulu keberadaan kami Suku Anak Dalam tidak terlalu diperhatikan," kata Seri.

Pengalaman Menyedihkan

Bripda Seri bercerita, niatnya bersungguh-sungguh membantu anak-anak Suku Anak Dalam belajar dilatarbelakangi pengalaman masa kecilnya dan mengaku sedih mengingat pengalamannya dulu.

Di masa itu, ia harus menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki melewati hutan untuk sampai ke sekolah. Berangkat dari rumah ke sekolah sejak jam 5 pagi dan baru sampai sekitar 1 jam 30 menit kemudian.

"Ketika saya, zaman dulu, zaman sekolah rasanya dengan sekarang ini menangis seperti itu. Karena zaman sekarang, zaman modern, sudah serba bisa, sudah ada jalan, aktivitasnya sudah bagus. Kalau zaman saya sekolah dulu jalannya belum ada, apalagi di desa saya jalannya tidak ada, cuman jalan hutan jalan tikus, jalan belum ada, lewatnya hutan," cerita dia.

Bripda Seri berharap lebih banyak warga Suku Anak Dalam yang dapat mengakses pendidikan tinggi. Selain itu, dia juga berharap





mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih layak, dengan peningkatan kesejahteraan dan peluang yang lebih besar di masa depan.

"Harapan saya, semoga adanya seperti saya ini, semoga adik-adik saya lebih semangat lagi mengikuti jejak saya dan adik-adik saya menjadi orang seperti saya, menjadi guru, dokter dan sebagainya," kata Bripda Seri.

"Alhamdulillah di warga saya semenjak saya menjadi anggota

Polri, sudah banyak sekarang yang sudah sekolah, kurang lebih yang SD sudah 20-an orang, yang SMK sudah 4 orang, SMP 2 orang," kata Bripda Seri.

Bripda Seri Santoso dilantik menjadi anggota Polri pada 22 Desember 2021 melalui rekrutmen proaktif (Rekpro) jalur affirmative Polda Jambi. Bersama Seri Santoso, juga dilantik sebagai personel Polri dua pemuda lain dari Suku Anak Dalam yakni Bripda

"Harapan saya, semoga adanya seperti saya ini, semoga adik-adik saya lebih semangat lagi mengikuti jejak saya dan adik-adik saya menjadi orang seperti saya, menjadi guru, dokter dan sebagainya,"

Perbal Tampung dan Bripda Jeni Adi Saputra.

Seri berdinias di Polsek Pelepat, wilayah hukum Polres Muaro Bungo. Sementara Perbal berdinias di Polres Sarolangun dan Jeni di Polres Merangin. Bagi Suku Anak Dalam ketiganya dianggap memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak-anak setempat untuk meraih cita-cita mereka. [*]

Dedikasi Tanpa Batas,

Polisi Ini Sediakan Pendidikan Dini Gratis di Perbatasan

Di perbatasan RI-Timor Leste, pendidikan gratis sangat membantu anak-anak kurang mampu.

Di balik seragamnya sebagai anggota kepolisian, Ipda Ristiani Densy Doko terbukti berhasil menunjukkan sisi kemanusiaan yang luar biasa. Ia bersama sang suami, Aipda Nikodemus Dubu telah mendedikasikan hidupnya untuk membantu anak-anak kurang mampu di daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Pasangan itu mendirikan Yayasan Gracia Hati Mulia yang mengelola panti asuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) gratis untuk anak-anak kurang mampu di Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).





Gagasan tersebut bukan sekadar bentuk rasa syukur, tapi cerminan kepedulian terhadap realitas sosial masyarakat di perbatasan masyarakat yang serba kekurangan.

Langkah besar Ristiani dan sang suami dimulai dari pengalaman hidup yang sangat pribadi ketika mengalami kondisi kesehatan yang buruk bahkan sempat dinyatakan mustahil sembuh. Dikenal sebagai polisi wanita yang rendah hati, Ristiani bernazar akan membangun yayasan untuk membantu anak-anak kurang mampu.

Tak ada donatur tetap dan tanpa sponsor, pasangan tersebut meyakini bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan mereka. "Kami hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Kami sadar, banyak yang lebih membutuhkan. Ini nazar kami ketika saya dulu divonis sakit dan merasa harapan itu nyaris hilang," kenang Ristiani.

Ketika kesehatannya berangsur membaik, pasangan itu memutuskan menepati nazar untuk membantu sesama. Mereka lantas mendirikan yayasan sosial yang kemudian diberi nama Yayasan Gracia Hati Mulia pada tahun 2019. Yayasan itulah yang kemudian menaungi panti asuhan serta sekolah PAUD gratis untuk anak-anak kurang mampu.

Saat ini, Panti Asuhan Gracia Hati Mulia ini membiayai dan menyantuni 67 anak kurang mampu dan yatim piatu dengan 13 anak yang tinggal di panti dan sisanya masih bersama anggota keluarganya.

"Sedangkan yang 13 anak ini itu kita biayai mereka seutuhnya, mulai dari pakaian, makan-minum, uang sekolah dan lain sebagainya, itu semua berasal dari kita. Kalau yang di luar panti itu kita tetap santuni setiap bulan," cerita Ristiani.

PAUD Gratis

Selain panti asuhan, untuk mengakomodasi pendidikan usia dini pasangan itu membangun sekolah PAUD Elshaddai yang disediakan secara gratis mulai dari pendaftaran, uang sekolah, seragam, hingga buku pelajaran. Agar kualitas pendidikan tetap terjaga, para guru di PAUD Elshaddai juga memiliki latar belakang pendidikan formal yang sesuai yakni lulusan sarjana PG-PAUD.

Memiliki lima orang guru termasuk petugas administrasi, keberadaan PAUH Elshaddai yang mengratiskan biaya sekolah terbukti sangat membantu masyarakat sekitar.

"Kami ingin memberikan kesempatan bagi anak-anak di sini untuk belajar tanpa harus memikirkan biaya. Kami menyediakan seragam, buku, dan segala kebutuhan sekolah lainnya secara gratis. Kami juga memastikan tenaga pendidik di sini adalah mereka yang berkompeten di bidangnya," tambah Ristiani.





“Kita tahu bahwa pendidikan itu sangat penting buat anak-anak, saya berharap wilayah perbatasan RI-RDTL itu tidak kalah seperti anak-anak yang ada di Pulau Jawa. Mereka tidak menjadi anak-anak yang terlalu tertinggal, khususnya untuk masalah pendidikan,”

Sedangkan untuk operasional panti dan PAUD Elshaddai, kebutuhan pembiayaan sepenuhnya ditanggung Ristiani dan suaminya. Mereka mengalokasikan biaya tersebut dari gaji yang mereka terima sebagai polisi dan hasil sewa kos-kosan yang memang dimiliki pasangan itu. Dalam satu semester, biaya yang dikeluarkan untuk operasional mencapai lebih dari Rp 20 juta, termasuk untuk seragam dan perlengkapan belajar.

“Kalau untuk anak-anak PAUD itu kita biasanya per semester. Misalnya sekarang kan ada 90 siswa lebih, saya keluarkan khusus untuk pakaian seragam sekitar Rp 12 sampe Rp 13 juta. Itu di luar yang buku tulis dan yang lain sebagainya, buku tulis dan bacaan itu kurang lebih mungkin sekitar Rp 8 jutaan,” kata Ristiani.

“Kalau untuk gaji guru sendiri kami sudah kerja sama dengan dinas pendidikan. Jadi mereka punya insentif guru yang memang tidak sesuai dengan UMR, tetapi kami dari yayasan sendiri menambahkan lagi untuk para guru itu.”

Kepedulian pasangan itu menginspirasi rekan-rekan polisi lainnya di Polres Belu. Beberapa di antaranya ikut memberikan bantuan dalam bentuk uang atau sembako. Meski tidak rutin, bantuan ini menjadi bentuk dukungan moral atas perjuangan Ristiani dan suaminya.

Dengan ketulusan dan semangat tanpa pamrih, Ristiani telah membuktikan bahwa seorang anggota polisi tidak hanya berperan menjaga keamanan, tetapi juga bisa menjadi penggerak perubahan sosial yang nyata. Ia bukan hanya ibu bagi tiga anak kandungnya, tetapi juga menjadi ibu bagi puluhan anak asuh yang kini memiliki harapan baru di tengah keterbatasan.

Ristiani berharap pendidikan dapat membuat anak-anak di Belu memiliki masa depan yang cerah. Dia tidak ingin pendidikan anak-anak di perbatasan Indonesia-Timor Leste tertinggal oleh anak-anak di Pulau Jawa.

“Kita tahu bahwa pendidikan itu sangat penting buat anak-anak, saya berharap wilayah perbatasan RI-RDTL itu tidak kalah seperti anak-anak yang ada di Pulau Jawa. Mereka tidak menjadi anak-anak yang terlalu tertinggal, khususnya untuk masalah pendidikan,” kata Ristiani. [*]

Spontan Lepas Seragam, **Aksi Kapolsek Ini Tuai Penghargaan**

Tanpa pikir panjang Kapolsek Medan Tuntungan melepas seragam yang dikenakannya untuk menutupi korban laka lantas. Aksinya menuai puji dan penghargaan dari berbagai kalangan.

Dikabari Camat Medan Tuntungan, Berani Perangin-angin bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas, Kapolsek Iptu Eko Sanjaya segera menghubungi anggotanya yang ternyata kebetulan sudah berada di lokasi kejadian yang terletak di Jl Jamin Ginting, Medan Selayang, Kota Medan.

Tak berselang, telepon dari anggotanya yang lain juga mengabarkan sang driver yang terlibat kecelakaan itu akan dimassa. Anggota itu juga memintanya untuk datang bersama ambulans.

Ingat di kantor camat ada ambulans, Eko minta tolong camat untuk mengirim ambulans tersebut. Ia sendiri bergegas ke lokasi kejadian. Sempat terhalang macet, Eko akhirnya ikut ke dalam ambulans tersebut.





Benar saja, begitu sampai di TKP situasi lalu lintas crowded dan jalanan macet sementara sopir sudah di amankan. Eko segera menurunkan tandu dan bersiap memindahkan jenazah korban. Dalam momen tersebut Eko dengan sigap melepas baju dinasnya dan membentangkannya di bagian kepala korban. Jenazah kemudian diangkat dan diletakkan di atas tandu dan segera dimasukkan ke ambulans untuk di bawa ke rumah sakit.

"Waktu sampai jenazah mahasiswi itu sudah tergeletak di jalan dan ditutupi koran. Saya membuka baju dinas saat mengangkat jenazah itu ke dalam ambulans," tutur Eko saat diwawancara dalam podcast Polda Sumut.

Setelah jenazah korban dibawa ke rumah sakit, lalu lintas dan keadaan di lokasi kejadian berangsut-angsur mencair. Jalanan kembali

lancar dan masyarakat kembali beraktivitas. Korban adalah seorang mahasiswi berusia 18 tahun dan meninggal dunia di lokasi kejadian karena mengalami luka serius di bagian kepala. Jenazahnya dibawa ke RS Adam Malik Medan.

Tanpa menyadari aksinya direkam dan diunggah ke media sosial, belakangan tindakan humanis Eko itu viral di dunia maya dan menuai apresiasi serta puji dari berbagai kalangan.

"Saya spontanitas saja. Saya juga punya anak perempuan jadi saya merasa bagaimana kalau itu keluarga kita. Sebagai anggota polisi saya berusaha memberikan pertolongan secepat mungkin kepada masyarakat," tutur Eko menjelaskan aksinya. "Nggak nyangka viral, lebih banyak polisi lain yang lebih baik dari saya. Itu kemanusian saja."

Naik Pangkat

Selain pujian di dunia maya, aksi Eko juga menjadi perhatian pimpinannya yakni Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan yang memberikan penghargaan.

Pada saat acara Jumat Curhat di greenhouse Keluarahan Sidomulyo, Eko tiba-tiba dipanggil MC untuk menerima sertifikat Respon Cepat Penanganan Laka. Tak hanya penghargaan, Kapolrestabes juga sekaligus mempromosikan Eko dengan jabatan baru sebagai Kanit 4/Resmob Satreskrim Polrestabes Medan. Jabatan itu membuat Iptu Eko Sanjaya naik pangkat menjadi AKP.



Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan membenarkan mutasi dan penunjukan Iptu Eko Sanjaya sebagai Kanit 4/Resmob Satreskrim Polrestabes Medan. "Ya kemari mutasinya," kata Kombes Gidion saat dikonfirmasi, Minggu 27 April 2025.

Gidion menilai, apa yang dilakukan Iptu Eko Sanjaya adalah sebuah cara bertindak yang spontan berdasarkan instingif yang kuat dengan karakter yang dimilikinya.

"Menurut saya yang dilakukan Kaporsek Tuntungan Iptu Eko Sanjaya adalah sebuah cara bertindak yang spontan berdasarkan instingif yang kuat



dengan karakter yang dimiliki, yang tidak semua orang berpikir untuk melakukan seperti yang dia lakukan," kata Gidion.

Ditambahkan juga, apa yang dilakukan Eko menggambarkan atau mengimplementasikan cara bertindak yang sangat natural dan realistik yang itu semua adalah menyimpulkan kematangannya secara personal untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan di lapangan.

"Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua setiap anggota Polri untuk matang dalam melihat situasi dan bertindak secara cepat, tepat dan humanis," kata dia.

Apa yang disampaikan Gidion memang benar adanya, kebaikan sekecil bahkan kalaupun itu bersifat spontan harus menjadi inspirasi untuk mewujudkan masyarakat yang jauh lebih baik seperti aksi yang dilakukan Eko. Termasuk jika terselip sebuah pertanyaan kemana seragam itu sekarang?

"Semula seragam itu ditinggal di rumah sakit bersama korban. Ternyata oleh anggota saya dibawa ke kantor. Sekarang sudah saya cuci untuk jadi kenang-kenangan pribadi seumur hidup," tutup Eko. [†]



Aksi Damai May Day di Malang, Polwan Berbagi Hingga Aparat Bergotong Royong

DIVISI HUMAS POLRI



**INOVASI
DIVHUMAS**
Biro Penmas Polri
Majalah Tribrata News
Tersedia Online



www.humas.polri.go.id